

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

2014



<http://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

2014



LAPORAN PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT 2014

ISBN : 978-602-1196-54-0

Nomor Publikasi : 13550.15.09

Katalog BPS : 9199007.13

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman : x + 123

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Kata Pengantar

Publikasi Laporan Perekonomian Sumatera Barat 2014 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Dalam publikasi ini akan didapatkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian Sumatera Barat berdasarkan data tahun terakhir.

Pada Laporan Perekonomian Sumatera Barat 2014 terdapat informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi, harga-harga, perdagangan luar negeri, moneter, penanaman modal, kunjungan wisatawan dan perkembangan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini mungkin masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Padang, Oktober 2015

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



YOMIN TOFRI, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Gambaran Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2014	5
1.3. Cakupan Laporan	6
2. Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat	9
2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha	11
2.2. PDRB Menurut Penggunaan	15
2.3. PDRB Perkapita	17
2.4. Inflasi	20
2.5. Ekspor dan Impor	25
2.6. Penanaman Modal dan Kunjungan Wisatawan	27
3. Perkembangan Harga-Harga	31
3.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Kota Padang	33
3.2. Harga Produsen di Tingkat Petani dan Nilai Tukar Petani Selama Periode 2010 – 2014	40
3.3. Laju Inflasi di Pedesaan	43
4. Ekspor dan Impor	45
4.1. Ekspor	51
4.2. Impor	59
4.3. Neraca Perdagangan Sumatera Barat	63

5. Keuangan Daerah	65
5.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	67
5.2. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72
6. Perbankan	77
6.1. Struktur Perbankan	80
6.2. Penghimpunan Dana Bank	84
6.3. Posisi Kredit Perbankan	86
7. Penduduk	95
7.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	99
7.2. Pendidikan	101
7.3. Ketenagakerjaan	103
7.4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama	106
7.5. Kesejahteraan Masyarakat	108
8. Penutup	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2014	12
Tabel 2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Barat Menurut Penggunaan 2013 – 2014	18
Tabel 2.3.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, Sumatera Barat 2010 – 2014	20
Tabel 2.4.1 Laju Inflasi Kota Padang, 2007 – 2014.....	21
Tabel 2.4.2 Inflasi Bulanan Kota Padang, 2011– 2014.....	24
Tabel 2.5.1 Perkembangan Ekspor dan Impor Sumatera Barat 2010- 2014 (juta US \$)	26
Tabel 2.6.1 Rencana investasi PMDN dan PMA yang telah Mendapat Persetujuan Tetap menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2013 – 2014	28
Tabel 2.6.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Sumatera Barat, 2010 – 2014.....	30
Tabel 3.1.1 Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Padang, Tahun 2010 – 2014	34
Tabel 3.1.2 Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi dan Laju Inflasi Kota Padang Tahun 2014	37
Tabel 3.1.3 Laju Inflasi Kota Padang 2010 – 2014	39
Tabel 3.2. Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat, 2010 – 2014	42
Tabel 4.1.1 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Komoditi, 2013 – 2014.....	54
Tabel 4.1.2 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, 2013 – 2014	58

Tabel 4.2.1	Perkembangan Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Impor, 2005 – 2014	60
Tabel 4.2.2	Volume Impor Menurut Barang 1 Digit STIC, 2010-2014)	62
Tabel 4.2.5	Nilai Impor Menurut Golongan Barang 1 Digit STIC, 2010 – 2014	62
Tabel 4.3.1	Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2010-2014 (000 US \$)	64
Tabel 5.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 - 2014.....	71
Tabel 5.2.1	Ringkasan APBD Kabupaten/Kota menurut Sumber Penerimaan Tahun 2014	73
Tabel 5.2.2	Realisasi Pendapatan/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat, 2014	76
Tabel 6.1.1	Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sumatera Barat, 2012-2014	81
Tabel 6.2.1	Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR di Sumatera Barat, 2012-2014	85
Tabel 6.3.1	Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing menurut Jenis Penggunaan di Sumatera Barat, 2012–2014	89
Tabel 6.3.2	Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan di Sumatera Barat,2012-2014..	91
Tabel 6.3.3	Posisi Kredit Perbankan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2013 – 2014	92
Tabel 6.3.4	Posisi Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2012 – 2014	94
Tabel 7.1	Perkembangan Penduduk Sumatera Barat, 2010 – 2014	99
Tabel 7.1.1	Penduduk Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014	101
Tabel 7.2.1	Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2012 – 2014	102

Tabel 7.3.1	Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2012 – 2014	104
Tabel 7.3.2	Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2012 – 2014	105
Tabel 7.4.1	Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Lapangan Usaha Utama di Sumatera Barat Tahun 2013 dan 2014	107
Tabel 7.5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Sumatera Barat, Tahun 2013 dan 2014	109
Tabel 7.5.2.1	Gini Rasio dan Distribusi Pendapatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2003-2014	111
Tabel 7.5.2.2	Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat, 2010-2014	114
Tabel 7.5.2 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat, 2010 – 2014	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat, 2013 – 2014 .	14
Gambar 2.1.2 Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2014	15
Gambar 2.2.1 Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat Menurut Penggunaan, 2013 – 2014.....	19
Gambar 4.1.1 Perkembangan Nilai Ekspor Utama Hasil Pertanian, Industri, dan Pertambangan di Sumatera Barat, 2013 – 2014	55
Gambar 4.1.2 Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, 2013 – 2014	57
Gambar 4.3. Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2010 – 2014.....	64

1

PENDAHULUAN

- ✧ **LATAR BELAKANG**
- ✧ **GAMBARAN EKONOMI
SUMATERA BARAT TAHUN 2014**
- ✧ **CAKUPAN LAPORAN**

1.1. Latar Belakang

Di tengah ketidakseimbangan dan belum pulihnya perekonomian global menyebabkan kinerja perekonomian domestik masih mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami perlambatan. Penyebab hal tersebut karena ada masalah internal dan eksternal atau efek ekonomi global seperti faktor melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu juga *tapering off* yang dilakukan AS telah menjadi sentiment negatif terhadap pasar ekonomi di dalam negeri. Persoalan *current account deficit* yang masih membelenggu Indonesia masih menghantui ekonomi Indonesia selama 2014. Selain itu, masih terjalnya pertumbuhan ekonomi disebabkan pergerakan inflasi nasional yang mencapai 8,36 persen. Inflasi yang besar ini masih didorong oleh efek kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga mempengaruhi sektor industri pengolahan khususnya makanan dan minuman.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna membiayai impor. Impor meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan sehingga memacu perekonomian. Di sisi lain juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) yang kompetitif guna menunjang ekspor serta dapat mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan. Namun kondisi perekonomian dunia diperkirakan masih akan terus melambat. Hal ini diperkirakan akan menghambat kinerja ekspor Indonesia.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi Sumatera Barat tidak terlepas dari gejala ekonomi nasional maupun global. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi per triwulan sudah terdapat indikasi pertumbuhan ekonomi akan melambat. Perlambatan pertumbuhan

ekonomi Sumatera Barat berasal dari dampak melemahnya konsumsi rumah tangga akibat meningkatnya inflasi sejalan dengan kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan November 2014. Pelemahan konsumsi tersebut turut berdampak pada melesunya aktivitas perdagangan dan permintaan akan barang hasil industri. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan juga menunjukkan pelemahan pertumbuhan, khususnya pada aktivitas perdagangan.

Sampai saat ini perekonomian global masih mengalami keterpurukan. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi di beberapa negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat yang memburuk dan belum menemukan titik terang penyelesaiannya. Krisis ini juga menjalar ke kawasan Asia sehingga permintaan akan bahan baku dari Indonesia ke negara-negara seperti India dan China juga berkurang. Demikian juga kinerja ekspor impor semakin memburuk sejalan dengan permintaan global yang semakin berkurang. Walaupun demikian konsumsi rumah tangga tetap

meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat sehingga tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Bank Indonesia, tahun 2014 berhasil dilalui dengan kinerja stabilitas makroekonomi yang semakin kokoh dan proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat. Keberhasilan ini tercermin pada laju inflasi yang terkendali, defisit transaksi berjalan yang menurun, surplus transaksi modal dan finansial yang tinggi, volatilitas nilai tukar yang bergerak dalam trend menurun dan defisit fiskal yang terjaga. Hal ini tidak terlepas dari bauran kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan kebijakan fiskal untuk menjaga *sustainability* fiskal dalam merespon tantangan perekonomian yang tidak ringan. Namun, kondisi global yang kurang kondusif dan langkah stabilisasi makro yang diambil, di tengah belum optimalnya reformasi struktural, menyebabkan perekonomian domestik tumbuh melambat

Namun demikian di samping kinerja perekonomian yang semakin memburuk, perekonomian Indonesia

juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan yang utama antara lain terdiri dari derasnya aliran masuk modal asing, besarnya ekspekstasi likuiditas perbankan, inflasi yang meningkat, serta sejumlah permasalahan di sektor perbankan dan berbagai kendala di sektor riil.

Ekonomi Indonesia tumbuh sekitar enam persen selama beberapa tahun terakhir namun hal itu mereda dalam 12 bulan terakhir akibat melambatnya permintaan ekspor komoditas, dan kenaikan suku bunga pada 2013 selama terjadinya gejolak pasar.

Secara keseluruhan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah 5,85 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumbar secara umum masih ditopang oleh tingginya konsumsi rumah tangga disamping realisasi belanja konsumsi pemerintah.

1.2. Gambaran Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2014

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Kinerja perekonomian Sumatera Barat tahun 2014 secara keseluruhan masih menunjukkan perkembangan yang belum menggembirakan. Perkembangan ekonomi yang membaik di tahun sebelumnya mengalami penurunan sebagai akibat dari pengaruh kondisi ekonomi nasional maupun global. Perkembangan perekonomian tersebut walaupun menurun namun masih lebih tinggi daripada pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2014 tercatat sebesar 133,24 triliun rupiah, dengan pertumbuhan ekonomi 5,85 persen, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,02 persen. Dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku sebesar 167,04 triliun rupiah. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 146,88 triliun rupiah. Sementara itu nilai PDRB tahun 2013 atas dasar harga konstan sebesar 125,87 triliun rupiah.

Seperti halnya dengan tahun 2013, pada tahun 2014 seluruh sektor ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan sektor yang merupakan kontributor utama terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat adalah sektor pertanian.

Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh laju inflasi yang mengalami peningkatan. Laju inflasi yang terjadi di Kota

Padang pada tahun 2014 lebih tinggi dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 inflasi di Kota Padang tercatat sebesar 10,87 persen sedangkan di tahun 2014 mencapai 11,90 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nasional, inflasi di Kota Padang ini juga lebih tinggi. Angka inflasi nasional pada tahun 2014 adalah sebesar 8,36 persen.

1.3. Cakupan Laporan

Laporan Perekonomian Sumatera Barat tahun 2014 menyajikan informasi perkembangan indikator-indikator perekonomian yang menggambarkan perkembangan kemajuan ekonomi secara umum. Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat disajikan atas 7 bab. Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan kondisi perekonomian secara umum. Dalam Bab II terdapat perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor impor dan lain-lain. Bab III menampilkan perkembangan harga-harga yang meliputi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi di Kota Padang. Sedangkan mengenai perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor

serta neraca perdagangan ditampilkan pada Bab IV. Bab V menyajikan perkembangan keuangan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data perbankan yang meliputi struktur perbankan, penghimpunan dana dan posisi kredit perbankan terdapat pada Bab VI. Sedangkan pada Bab VII diuraikan mengenai perkembangan penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir BAB VIII adalah Penutup.

<http://sumbar.bps.go.id>



TINJAUAN EKONOMI SUMATERA BARAT

- ✧ **PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA**
- ✧ **PDRB MENURUT PENGGUNAAN**
- ✧ **PDRB PERKAPITA**
- ✧ **INFLASI**
- ✧ **EKSPOR DAN IMPOR**
- ✧ **LAIN-LAIN**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit.

Penghitungan PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Mulai tahun 2010 PDRB atas lapangan usaha ini dirinci atas tujuh belas sektor.

Kinerja perekonomian Sumatera Barat di tahun 2014 sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan PDRB yang tercipta yakni sebesar 5,85 persen. Sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 6,02 persen. Walaupun mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen. Namun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tahun 2014 tersebut masih pada kisaran target yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu sebesar 5,3 - 5,89 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi nasional masih di bawah prediksi pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 5,8 - 6,4 persen.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2014 (persen)

Lapangan Usaha	Pertumbuhan ¹⁾		Distribusi PDRB ²⁾	
	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,42	5,86	24,67	25,04
B Pertambangan dan Penggalian	7,61	4,34	4,60	4,86
C Industri Pengolahan	5,14	5,40	11,02	10,46
D Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	8,68	0,06	0,07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah & Daur Ulang	4,92	3,89	0,09	0,08
F Konstruksi	10,30	6,58	8,77	8,99
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	5,30	16,77	14,29
H Transportasi dan Pergudangan	8,47	7,31	11,22	11,71
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,90	6,44	1,07	1,10
J Informasi dan Komunikasi	9,11	8,37	5,26	5,20
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,27	5,14	3,15	3,10
L Real Estate	8,50	5,96	1,93	1,95
M,N Jasa Perusahaan	7,30	6,97	0,43	0,42
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,75	1,95	6,29	6,10
P Jasa Pendidikan	8,39	6,18	3,69	3,69
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,76	7,97	1,34	1,32
R,S, T,U Jasa Lainnya	5,30	6,52	1,62	1,61
PDRB	6,02	5,85	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Angka diperbaiki

***) Angka sementara

1) Atas Dasar Harga Konstan 2010

2) Atas Dasar Harga Berlaku

Walaupun mengalami sedikit penurunan, namun laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2014 masih mengalami peningkatan pada beberapa sektor. Sektor yang mengalami peningkatan yang besar

terdapat pada sektor A (Pertanian, kehutanan, dan perikanan) yang naik dari laju pertumbuhan sebesar 3,42 pada tahun 2013 menjadi 5,86 persen di tahun 2014, serta sektor D (pengadaan listrik dan gas) yang

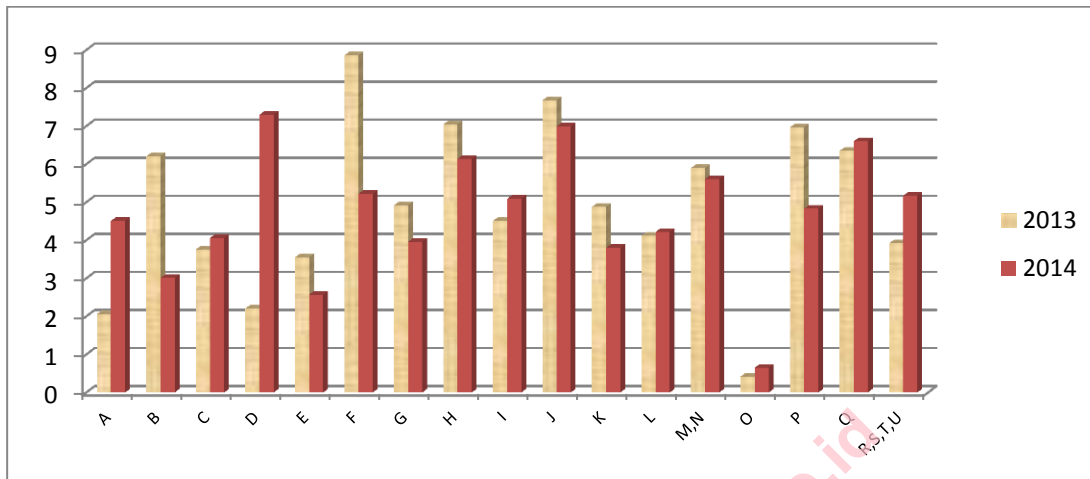
meningkat dari 3,56 di tahun 2013 menjadi 8,68 persen di tahun 2014. Pada tahun tersebut sektor D juga mencatat laju pertumbuhan tertinggi bila dibanding dengan sektor lainnya. Kondisi ini berbeda dengan keadaan di tahun 2013 dengan sektor F (Konstruksi) mengalami laju pertumbuhan tercepat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 10,30 persen, namun pada tahun 2014 sektor tersebut mengalami penurunan laju pertumbuhan menjadi 6,58 persen.

Selain sektor A dan D, masih terdapat lima sektor yang mengalami sedikit peningkatan laju pertumbuhan. Kelima sektor tersebut adalah sektor C (industri pengolahan) meningkat dari 5,14 persen menjadi 5,40 persen, sektor I (penyediaan akomodasi dan makan minum) meningkat dari 5,90 persen menjadi 6,44 persen. Sektor O (Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial) meningkat dari 1,75 persen menjadi 1,95 persen, sektor Q (jasa kesehatan dan kegiatan sosial) meningkat dari 7,76 persen menjadi 7,97 persen, dan sektor R, S, T. U (Jasa lainnya) yang meningkat dari 5,30 persen menjadi 6,52 persen.

Selain sektor di atas yang mengalami peningkatan, sepuluh sektor yang lain di tahun 2014 mengalami penurunan laju pertumbuhan. Diantara ke sepuluh sektor tersebut, sektor F (konstruksi) dan sektor L (real estate) memiliki penurunan yang cukup besar, yaitu masing-masingnya dari laju pertumbuhan dari 10,30 persen menjadi 6,58 persen dan dari 8,50 persen menjadi 5,96 persen.

Sampai tahun 2014 sektor pertanian masih merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dan masih yang utama di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB di tahun 2014 yang mencapai 25,04 persen. Kontribusi sektor pertanian sedikit meningkat dibanding tahun 2013 yang berada pada angka 24,67 persen. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB juga diiringi dengan peningkatan dalam laju pertumbuhan, yaitu dari 3,42 persen di tahun 2013 menjadi 5,89 persen di tahun 2014.

Gambar 2.1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Barat, 2013-2014



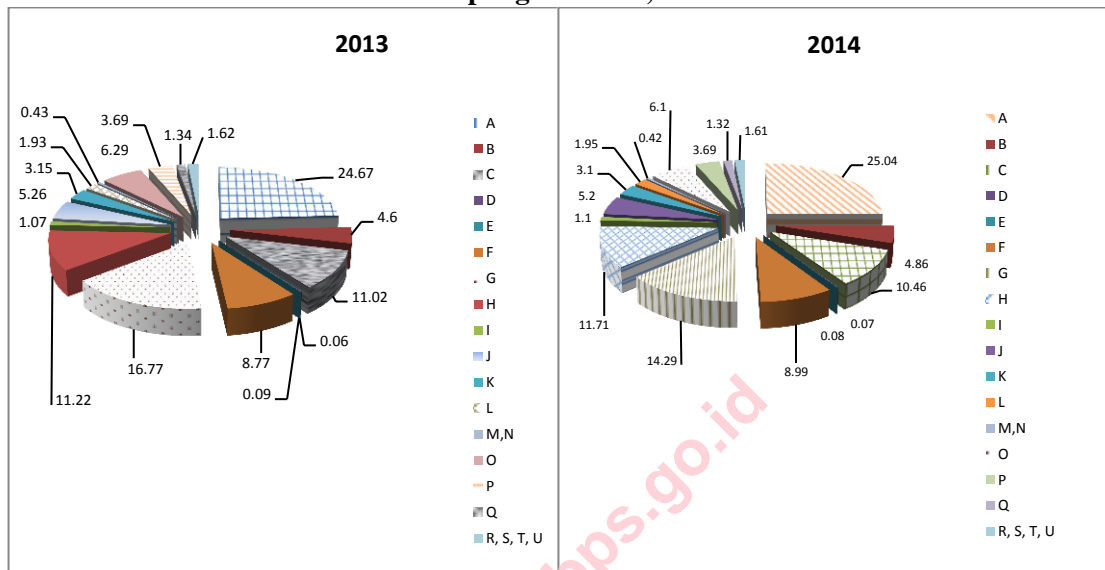
Keterangan :

- | | |
|--|--|
| A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan | J. Informasi dan Komunikasi |
| B. Pertambangan dan penggalian | K. Jasa Keuangan dan asuransi |
| C. Industri pengolahan | L. Real estate |
| D. Pengadaan listrik dan gas, | M ,N. Jasa Perusahaan |
| E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial |
| F. Konstruksi | P. Jasa Pendidikan |
| G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial |
| H. Transportasi dan pergudangan | R,S,T,U. Jasa lainnya |
| I. Penyediaan akomodasi dan makan minum | |

Sektor berikutnya yang mempunyai andil yang juga besar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat adalah sektor G (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor). Pada tahun 2014 sebesar 14,29 persen PDRB Sumatera Barat berasal dari sektor ini, namun sedikit menurun dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 16,77

persen. Suku Minang yang merupakan etnis mayoritas di Provinsi Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai saudagar yang tangguh, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. Dan hasilnya terlihat dari cukup besarnya sumbangan sektor G dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat, seiring dengan penurunan laju pertumbuhan di tahun 2014.

Gambar 2.1.2
Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat
Menurut Lapangan Usaha, 2013– 2014



Sementara itu sektor C atau sektor industri pengolahan mulai memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap perekonomian Sumatera Barat. Pada tahun 2013 sektor ini menyumbang 11,02 persen terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat, sedangkan pada tahun 2014 sedikit berkurang menjadi 10,46 persen. Sektor C ini hanya berbeda tipis dibanding sektor H (Transportasi dan pergudangan) yang berperan dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat pada kedua tahun tersebut masing-masingnya sebesar 11,22 dan 11,71 persen. Sementara itu sektor yang paling kecil peranannya adalah

sektor D (pengadaan listrik dan gas) yang hanya memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat sebesar 0,06 (tahun 2013) dan 0,07 persen (tahun 2014).

2.2 PDRB Menurut Penggunaan

PDRB menurut penggunaan merupakan seluruh komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumahtangga termasuk lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor bersih (ekspor-impor) dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2014, laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat ditinjau dari sisi permintaan yang paling besar adalah konsumsi lembaga non profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) yaitu sebesar 17,16 persen. Setelah konsumsi LNPRT, komponen yang memiliki laju pertumbuhan yang juga tinggi atau berada pada urutan kedua terdapat pada pengeluaran ekspor dengan laju pertumbuhan sebesar 7,17 persen. Setelah itu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi pemerintah juga memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun tersebut laju pertumbuhannya masing-masingnya adalah 5,34 dan 4,53 persen. Komponen yang paling kecil laju pertumbuhannya adalah perubahan inventori, dan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar 188,13 persen.

Sementara itu pada tahun 2013 laju pertumbuhan terbesar juga terjadi pada komponen konsumsi LNPRT dengan laju sebesar 10,15 persen, diikuti oleh ekspor dan konsumsi pemerintah, yang masing-masingnya mempunyai laju pertumbuhan sebesar

8,10 dan 4,83 persen. Sedangkan komponen yang memiliki laju pertumbuhan terkecil di tahun tersebut adalah perubahan inventori yang memiliki laju pertumbuhan -61,43 persen. Secara umum laju pertumbuhan PDRB Sumatera Barat menurut penggunaan pada tiap komponen di tahun 2014 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2013. Komponen yang memiliki laju pertumbuhan pada tahun 2014 yang lebih tinggi dibanding tahun 2013 hanya ada tiga komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, dan PMTB.

Dilihat dari distribusi PDRB menurut penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga masih merupakan yang utama dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat menurut penggunaan. Pada tahun 2013 komponen ini memberikan andil sebesar 55,16 persen. Selanjutnya di tahun 2014 terjadi sedikit penurunan dalam andil pengeluaran konsumsi rumahtangga menjadi 54,51 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas

barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumahtangga ini terdiri atas semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang bekas atau afkiran.

Komponen yang mempunyai distribusi yang juga cukup besar setelah pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah ekspor barang dan jasa. Pada tahun 2013 andilnya sudah mencapai 73,08 persen. Namun pada tahun 2014 komponen ekspor barang dan jasa ini mengalami sedikit peningkatan dalam distribusi PDRB dan tercatat menjadi 74,82 persen.

Sementara itu distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah di tahun 2014 sedikit meningkat dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014 distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,47 persen,

berkurang dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 13,40 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah ini merupakan jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, tidak termasuk atau dikurangi dengan hasil penjualan (penerimaan) dari produksi barang dan jasa (output pasar) yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah (yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah) tetapi dikonsumsi oleh masyarakat (bukan pemerintah). Sedangkan distribusi paling rendah di tahun 2014 terdapat pada komponen perubahan inventori yaitu sebesar -0,10 persen. Pada tahun sebelumnya komponen perubahan inventori juga memiliki andil paling kecil yakni sebesar 0,52 persen.

Tabel 2.2.1
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB
Provinsi Sumatera Barat Menurut Penggunaan
2013 - 2014 (Persen)

Komponen (1)	Pertumbuhan ¹⁾		Distribusi ²⁾	
	2013* (2)	2014** (3)	2013* (4)	2014** (5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,00	4,14	55,16	54,51
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	10,15	17,16	1,06	1,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,83	4,53	13,40	13,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,62	5,34	29,76	29,82
5. Perubahan Stok	-61,43	-188,13	0,52	-1,10
6. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa	8,10	7,17	73,08	74,82
7. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	5,07	4,82	72,98	73,63
PDRB	6,02	5,85	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

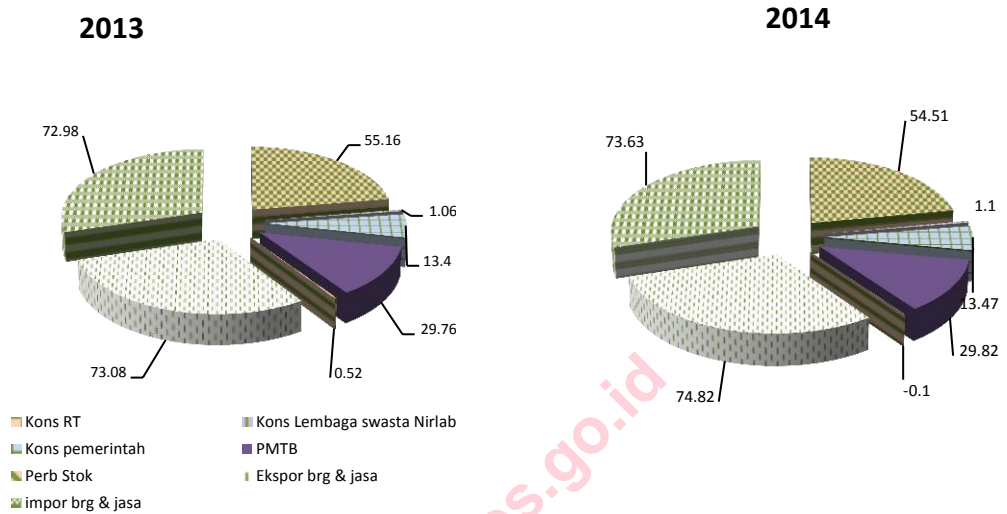
Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

¹⁾ ADHK 2010

²⁾ ADHB

Gambar 2.2.1
Distribusi Persentase PDRB Sumatera Barat,
Menurut Penggunaan 2013 – 2014 (Persen)



2.3. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang diperoleh dari penghitungan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Sedangkan PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk.

Pada tahun 2014 PDRB per kapita menurut harga berlaku Sumatera Barat adalah sebesar 32.546.441,17 rupiah. PDRB pada tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,27 persen dibanding dengan kondisi tahun 2013 dengan PDRB per kapita tercatat sebesar 28.991.573,27 rupiah.

Tabel 2.3.1
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Sumatera Barat 2010 – 2014.

Uraian	Tahun	Nilai Nominal	Kenaikan
		(rupiah)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Perkapita	2010	21 584 911,58	-
	2011	24 056 677,98	11,45
	2012	26 286 161,78	9,27
	2013 *)	28 991 573,27	10,29
	2014 **)	32 549 441,17	12,27

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Apabila dilihat selama lima tahun terakhir ini, PDRB per kapita Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Namun walaupun meningkat, akan tetapi kenaikan peningkatan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 kenaikan PDRB per kapita adalah 11,45 persen. Kenaikan PDRB per kapita mengalami peningkatan di tahun 2012 dan 2013 yang secara berturut-turut adalah 9,27 dan 10,29 persen. Sementara itu kenaikan pada tahun 2014 merupakan yang terbesar dalam periode 2010 dan 2014.

2.4. Inflasi

Angka inflasi di Kota Padang pada tahun 2014 adalah sebesar 11,90 persen. Angka inflasi Kota Padang ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 8,36 persen. Angka inflasi nasional pada tahun tersebut lebih tinggi dibanding dengan asumsi pada APBN-Perubahan sebesar 5,5 persen.

Inflasi Kota Padang di tahun 2014 tersebut juga lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 10,87 persen. Berdasarkan pada tingkat

keparahannya, inflasi pada tahun 2013 dan 2014 tersebut telah bergeser dari tergolong inflasi ringan (*creeping inflation*) di tahun 2012 menjadi sedang. Inflasi di bawah 10 persen tergolong ringan sedangkan inflasi sebesar 10 sampai 30 persen setahun termasuk sedang.

Tabel 2.4.1
Laju Inflasi Kota Padang 2007-2014
(persen)

Tahun	Inflasi
(1)	(2)
2007	6,90
2008	12,68
2009	2,05
2010	7,84
2011	5,37
2012	4,16
2013	10,87
2014	11,90

Selama periode tahun 2007-2014 inflasi di Kota Padang berada pada kisaran yang fluktuatif. Inflasi tahun 2014 merupakan yang tertinggi semenjak tahun 2009. Pada tahun 2008 inflasi di Kota Padang juga mencapai angka dua digit, yaitu sebesar 12,68 persen. Penyebab makin meningkatnya inflasi di tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya tidak terlepas dari

kenaikan harga BBM pada bulan November yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi. Kenaikan harga BBM ini memberikan efek pada semua komoditi barang/jasa lainnya yang juga mengalami kenaikan. ditambah dengan kurangnya pasokan beberapa hasil pertanian ke Sumatera Barat.

Pengembangan ekonomi dari sisi produksi membutuhkan dukungan dari daya beli masyarakat yang terjaga. Dalam konteks ini, maka pengendalian inflasi yang rendah dan stabil menjadi penting. Pasca kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah juga berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Meskipun dampak kenaikan harga BBM mulai mereda, gejolak harga bahan pangan khususnya dan barang/jasa lainnya masih menjadi penyumbang utama terhadap tingginya laju inflasi.

Kondisi yang hampir sama telah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2013 tersebut inflasi tercatat juga tinggi, yaitu mencapai sebesar 10,87 persen.

Inflasi ini termasuk tinggi bahkan melampaui dari target yang

ditetapkan pemerintah yang disebabkan karena adanya inflasi inti.

Ada tiga penyebab yang bisa mempengaruhi naik atau turunnya inflasi, yaitu pertama *demand full inflation* karena besarnya permintaan yang biasanya terjadi pada bulan puasa (bulan Ramadhan), Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kedua, *cost push inflation* yang terjadi karena adanya kelangkaan produksi dan kenaikan harga input produksi. Ketiga, *imported inflation* yang berasal dari luar negeri. Seperti barang yang diimpor, terjadinya kenaikan sehingga barang yang ada di dalam negeri juga akan mengalami peningkatan. Kalau tidak ada gangguan dari *cost push inflation* dan *imported inflation*, maka tingkat inflasi tidak akan terlalu tinggi kenaikannya.

Selama ini inflasi yang tinggi sering terjadi akibat dampak dari kebijakan pemerintah dalam menurunkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sehingga harga BBM menjadi naik. Kenaikan harga BBM ini sangat mempengaruhi harga barang dan jasa lainnya, dan secara otomatis inflasi juga menjadi tinggi. Dari

fluktuasi inflasi yang terjadi selama ini ternyata kebijakan pemerintah dalam penetapan harga barang yang dikendalikannya sangat menentukan kenaikan atau penurunan inflasi. Sebaliknya penurunan angka inflasi seperti yang terjadi pada tahun 2009 yang lalu juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah, antara lain melakukan penurunan harga BBM sebanyak tiga kali yang merupakan tindak lanjut dari turunnya harga minyak dunia.

Inflasi bulanan di Kota Padang juga bergerak pada angka yang fluktuatif. Ada bulan yang mengalami inflasi namun ada juga yang mengalami deflasi. Selama periode tahun 2011 sampai 2014 ini inflasi bulanan juga diiringi dengan bulan-bulan yang mengalami deflasi. Pada tahun 2011 ditemui dua bulan yang mengalami deflasi, sedangkan pada tahun 2012 terdapat tiga bulan yang deflasi. Selanjutnya di tahun 2013 hanya ada satu bulan yang mengalami deflasi, yaitu di bulan September, dan pada tahun 2014 kembali tiga bulan yang mengalami deflasi.

Deflasi merupakan keadaan sebaliknya dari inflasi, yaitu harga barang dan jasa justru mengalami penurunan. Deflasi nasional dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertama, deflasi nasional dapat menjadi faktor penahan untuk kenaikan suku bunga nasional. Selain itu, deflasi dapat menurunkan biaya pembelian bahan baku untuk industri pengolahan. Namun, deflasi juga dapat menaikkan konsumsi masyarakat karena adanya dorongan harga yang lebih murah.

Kendati pada tahun 2014 terdapat tiga bulan yang mengalami inflasi, inflasi yang terjadi di bulan lainnya terjadi dalam angka yang tinggi. Diantara bulan-bulan yang mengalami inflasi terdapat lima bulan yang mengalami inflasi di atas satu persen. Bulan-bulan itu adalah bulan Januari, Agustus, Oktober,

November dan Desember. Pada bulan Januari inflasi tercatat sebesar 1,86 persen. Tingginya harga barang dan jasa pada bulan Januari merupakan fenomena rutin yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya sebagai akibat dari adanya perayaan hari natal dan tahun baru. Selanjutnya pada bulan Agustus inflasi tercatat sebesar 1,83 akibat dari awal dari tahun ajaran baru. Inflasi yang paling tinggi terjadi di bulan November dengan angka mencapai 3,44 persen sebagai akibat adanya kenaikan harga BBM yang diikuti juga oleh kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Inflasi yang tinggi ini terus berlanjut di bulan Desember yang mencapai 2,66 persen dan ini merupakan inflasi bulanan tertinggi kedua selama tahun 2014. Sementara itu inflasi terendah ditemui di bulan September dengan angka sebesar 0,33 persen.

Tabel 2.4.2

Inflasi Bulanan Kota Padang, 2011-2014 (persen)

Bulan	2011	2012	2013	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	3,70	0,56	1,19	1,89
Februari	0,44	-0,82	0,70	-0,64
Maret	-2,59	0,35	0,31	-0,39
April	-1,07	0,44	0,58	-0,09
Mei	0,08	-0,31	0,69	0,05
Juni	0,11	1,25	1,45	0,31
Juli	0,77	0,04	2,43	0,81
Agustus	1,13	0,82	0,89	1,83
September	1,24	0,56	-0,05	0,33
Oktober	0,63	0,66	0,77	1,18
November	0,46	-0,62	0,46	3,44
Desember	0,48	0,78	0,50	2,66

Sumber : Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi Kota Padang 2005 – 2014

Catatan : ^{*)} = Tahun dasar 2012 = 100

2.5. Ekspor dan Impor

Sampai dengan tahun 2011, kinerja ekspor memperlihatkan kondisi yang sangat kondusif, namun sejak tahun 2012 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh gejolak perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor yang menyebabkan penurunan permintaan beberapa komoditas asal Sumatera Barat. Tidak menentunya harga komoditi ekspor di pasar dunia juga ditengarai menjadi penyebab melemahnya kinerja ekspor tersebut.

Sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang perlu diwaspadai guna menunjang kinerja ekspor yang lebih baik dan agar dapat menghasilkan cadangan devisa yang masih sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan ekonomi. Permasalahan yang mendesak untuk dipikirkan oleh pemerintah yaitu semakin tajamnya persaingan global dalam perdagangan internasional dan semakin ketatnya standar kualitas beberapa komoditi ekspor Indonesia yang ditetapkan di beberapa negara mitra dagang.

Untuk itu pemerintah tetap berupaya untuk merumuskan kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi guna menunjang dan meningkatkan kelancaran arus barang dengan membuat peraturan yang mempermudah para eksportir dalam mengurus birokrasi kepabeanan yang selama ini mempersulit prosedur komoditi ekspor ke luar negeri dan juga menjadi fasilitator dalam mencari pasar internasional bagi produk dalam negeri.

Selain kebijakan ekspor, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dibidang impor yaitu dengan mengupayakan untuk tetap menunjang serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor. Untuk mendorong kegiatan industri pengolahan, pemerintah mulai mengatur tata cara impor

mesin dan peralatan mesin bukan baru dengan menetapkan kriteria mesin dan peralatan mesin bukan baru yang dapat diimpor dan ketentuan mengenai uji kelaikan barang impor tersebut. Disamping itu kebijakan impor juga ditujukan untuk tetap menjaga tersedianya kebutuhan barang dan jasa, dan meningkatkan pendayagunaan devisa dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Sampai dengan tahun 2011, neraca perdagangan Sumatera Barat menunjukkan kondisi yang membesarkan hati. Setiap tahun nilai ekspor dan impor selalu mengalami peningkatan dan nilai ekspor selalu lebih besar dari pada impor. Namun mulai tahun 2012 terjadi penurunan kinerja ekspor dan impor di Sumatera Barat dan terus berlanjut di tahun 2014.

Tabel 2.5.1
Perkembangan Ekspor – Impor
Sumatera Barat 2010-2014 (Jutaan US \$)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor	2 214,77	3 031,82	2 363,58	2 209,01	2 105,61
Impor	751,38	1 076,74	1 242,93	1 035,00	1 034,61

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada awal periode atau pada tahun 2010 tercatat ekspor Sumatera Barat sebesar 2,21 milyar US \$, sedangkan impor sebanyak 0,75 milyar US \$. sehingga neraca perdagangan adalah 1,46 milyar US \$. Kondisi ini terus berlanjut sampai dua tahun berikutnya. Pada tahun 2011 kinerja ekspor dan impor Sumatera Barat mencapai titik tertinggi dalam periode tahun 2010-2014. Pada tahun tersebut senilai 3,03 milyar US \$ komoditi ekspor asal Sumatera Barat telah dikirim ke berbagai belahan negara di dunia sedangkan impor mencapai 1,08 milyar US \$ sehingga neraca perdagangan menjadi 1,96 milyar US \$.

Kondisi yang menggembirakan ini sayang sekali tidak berlanjut di tahun 2012. Sejak tahun tersebut nilai ekspor Sumatera Barat mengalami penurunan

yang cukup signifikan sedangkan impor justru mengalami peningkatan. Ekspor Sumatera Barat di tahun tersebut tercatat sebesar 2,36 milyar US \$, sedangkan impor adalah sebesar 1,24 milyar US \$ sehingga neraca perdagangan adalah sebesar 1,12 milyar US \$. Penurunan kinerja ekspor impor terus berlanjut pada tahun 2013. Ekspor pada tahun tersebut adalah sebesar 2,21 milyar US \$ dengan impor sebanyak 1,04 milyar US \$. Walaupun nilai ekspor dan impor di tahun 2013 sama-sama mengalami penurunan namun neraca perdagangan pada tahun itu sedikit membaik dibanding dengan tahun 2012, yaitu sebesar 1,17 milyar US \$. Selanjutnya pada tahun 2014 ekspor tercatat sebanyak 2,11 milyar US \$ dan impor sebesar 1,03 milyar US \$. Penurunan ekspor ini terjadi karena tidak

menentunya kondisi perekonomian negara tujuan ekspor sehingga permintaan akan komoditi yang merupakan produk unggulan Sumatera Barat juga berkurang.

2.6. Penanaman Modal dan Kun- jungan Wisatawan

Minat investor dalam menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 makin menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan keinginan dalam menanamkan investasi terlihat pada kedua macam jenis pemodal, namun peningkatan calon investor dalam negeri dalam menanamkan modalnya bertambah sangat signifikan.

Persetujuan investasi yang diberikan oleh BKPM/BKPMD kepada calon investor dalam negeri pada tahun 2014 adalah senilai 2,24 triliun rupiah. Nilai investasi di tahun tersebut menurun tajam dibanding tahun 2013 yang mencapai 79,83 triliun rupiah. Sedangkan untuk nilai rencana investasi asing di tahun 2014 tercatat sebesar 10,20 milyar US \$,

meningkat dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 290,06 juta US \$.

Sektor yang telah mendapat persetujuan tetap dalam rencana investasi oleh PMDN di Sumatera Barat pada tahun 2014 terdiri dari enam sektor. Enam sektor yang diminati investor dalam negeri itu adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan listrik, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sektor yang paling besar rencana nilai investasi dari PMDN pada tahun 2014 adalah sektor pertanian. Pada tahun tersebut telah disetujui investasi sebesar 1,54 triliun rupiah. Namun demikian, dibanding tahun sebelumnya telah terjadi penurunan rencana investasi yang sangat signifikan oleh investor dalam negeri, karena pada tahun 2013 terdapat 76,08 triliun rupiah yang akan diinvestasikan oleh investor dalam negeri ke sektor pertanian. Pada urutan kedua adalah sektor listrik, gas dan air bersih yang telah disetujui investasi sebesar 477,05 milyar rupiah. Hal ini berbeda dengan keadaan di tahun

2013 yang mempunyai nilai investasi kedua adalah sektor industri pengolahan juga telah disetujui untuk dilakukan investasi sebesar 3,68 triliun rupiah.

Minat investor asing menanamkan modal pada tahun 2014 meningkat signifikan dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 telah disetujui investasi oleh pihak asing senilai 290,06 juta US \$, sedangkan pada

tahun 2014 disetujui rencana investasi sebesar 10,20 milyar US \$. Pada tahun 2013 investor asing lebih berminat ke sektor industri pengolahan dibanding sektor lainnya, dengan nilai investasi sebesar 217,40 juta US \$, demikian juga pada tahun 2014 sektor industri pengolahan menempati posisi utama dalam menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Sumatera Barat, yaitu dengan nilai 10,01 milyar rupiah.

Tabel 2.6.1

Rencana Investasi PMDN dan PMA yang Telah Mendapat Persetujuan Tetap Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat, 2013-2014

Lapangan Usaha	2013		2014	
	PMDN (juta rupiah)	PMA (ribu US\$)	PMDN (juta rupiah)	PMA (ribu US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pertanian	76 077 977,60	-	1 454 641,27	6 200
2 Pertambangan dan Pengalihan	52 545,00	-	132 513,50	146 202,05
3 Industri Pengolahan	3 684 540,50	217 398,70	162 958,00	10 010 100,00
4, Listrik, Gas dan Air Bersih	-	29 660,43	477 046,49	-
5 Bangunan	-	36 050,00	6 476,60	2 727,27
6 Perdagangan, hotel dan Restoran	-	752,69	5 500,00	29 920,33
7 Pengangkutan dan Komunikasi	19 500,00	5 000,00	-	-
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa	-	-	-	-
9 Jasa-Jasa	-	1 200,00	-	5 454,54
Jumlah	79 834 563,10	290 061,82	2 239 135,86	10 200 604,19

Sumber : BKPM Sumatera Barat

Pada tahun 2010 wisatawan yang terdiri dari wisatawan mancanegara dan domestik tercatat sebanyak 4.602.692 orang. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat merupakan wisatawan domestik, yaitu pada tahun tersebut tercatat sebanyak 4.575.601 orang dan hanya sebanyak 27.091 orang merupakan wisatawan mancanegara. Dengan kata lain sebanyak 99,41 persen adalah wisatawan domestik dan sisanya 0,59 persen yang merupakan wisatawan mancanegara.

Dalam periode tahun 2010 – 2014 wisatawan mancanegara yang

datang ke Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat makin mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 29.638, 36.953, dan 48,583 orang. Pada tahun 2014 peningkatan itu terus berlanjut menjadi 56.111 orang. Hal ini berarti dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat lebih dua kali lipat atau tepatnya sebanyak 107,12 persen.

Tabel 2.6.2

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Sumatera Barat, 2010 – 2014 (orang)

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	27 091	4 575 601	4 602 692
2011	29 638	*)	*)
2012	36 953	*)	*)
2013	48 583	*)	*)
2014	56 111	*)	*)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Keterangan : *) Data tidak tersedia

http://sumbar.bps.go.id

3

PERKEMBANGAN HARGA-HARGA

- ✧ **PERKEMBANGAN IHK DAN LAJU INFLASI**
- ✧ **HARGA PRODUSEN DI TINGKAT PETANI DAN NILAI TUKAR PETANI**
- ✧ **LAJU INFLASI DI PEDESAAN**

Perkembangan harga-harga yang terjadi dapat dilihat dari angka inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Sedangkan secara luas inflasi dapat juga berarti melemahnya nilai mata uang yang disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar untuk membeli barang-barang di pasaran.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Pertama inflasi terjadi karena naiknya permintaan (*demand full inflation*), dan yang kedua inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*) serta yang ketiga inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang-barang di luar negeri sehingga mempengaruhi harga-harga barang di dalam negeri (*imported inflation*).

Di bidang harga, pemerintah secara bertahap melanjutkan penyesuaian harga sejumlah barang pada harga pasarnya. Kebijakan pemerintah di bidang pendapatan antara lain diarahkan untuk mempertahankan daya beli sebagian

masyarakat, khususnya mereka yang berpendapatan tetap. Beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang turut mempengaruhi laju inflasi seperti adanya pengurangan subsidi BBM, kenaikan harga LPG, kenaikan harga air PAM dan kebijakan lainnya seperti menaikkan tarif dasar listrik (TDL), tarif telepon ataupun kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) juga dapat memacu laju inflasi.

3.1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi Kota Padang

Penghitungan indeks harga konsumen (IHK) yang merupakan dasar penghitungan inflasi diperoleh dari hasil pengolahan data harga konsumen (HK). Mulai Januari 2014, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2012=100 dan mencakup 82 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 49 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007=100 dan hanya mencakup 66 kota. Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari mencakup antara 225 atau 462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh

kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok terdiri dari beberapa sub kelompok, dan dalam setiap sub kelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut

memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Hasil penghitungan IHK umum di Kota Padang pada periode tahun 2010 sampai 2014 setiap bulannya berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan.

Tabel. 3.1.1
Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum Kota Padang, tahun 2010 – 2014
Tahun Dasar 2007 = 100 dan 2012 = 100

Bulan	2010	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	120,29	132,42	135,31	103,29	114,76
Februari	120,50	133,00	134,09	104,01	114,03
Maret	119,62	129,55	134,67	104,33	113,58
April	119,94	128,16	135,29	104,93	113,58
Mei	120,59	128,26	134,71	105,65	113,54
Juni	122,50	128,40	136,35	107,18	113,89
Juli	124,33	129,39	136,53	109,78	114,81
Agustus	123,87	130,85	138,01	110,76	116,91
September	123,41	132,47	138,75	110,71	117,30
Oktober	123,48	133,30	139,73	111,56	118,68
November	125,19	133,91	138,85	112,07	122,76
Desember	127,69	134,55	140,15	112,63	126,03

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Padang 2005 -2014, BPS Prov. Sumatera Barat

Catatan : ^{*)} tahun dasar 2012 = 100

Pada tahun 2013 atau pada saat dimulai pemakaian tahun dasar 2012, pola IHK berbeda dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut angka IHK hampir selalu mengalami peningkatan, dan hanya pada bulan September yang mengalami sedikit penurunan. Pada bulan Januari 2013 IHK tercatat sebesar 103,29. Sampai bulan Mei IHK meningkat dengan angka yang tidak terlalu tinggi. Namun pada bulan Juni terjadi peningkatan yang lebih besar dibanding sebelumnya, sehingga di bulan tersebut tercatat IHK sebesar 107,18. Pada bulan Juli makin besar peningkatannya yaitu sebesar 109,78. Pada bulan September IHK mengalami sedikit penurunan dari 110,76 di bulan Agustus menjadi 110,71. Pada bulan berikutnya peningkatan IHK kembali seperti di awal tahun dengan penambahan nilai IHK yang relatif stabil.

Pola angka IHK yang lain terdapat pada tahun 2014. Pada tahun tersebut pada bulan Januari sampai Mei IHK mengalami peningkatan, yang dimulai dari angka IHK 114,76 di bulan Januari, pada bulan

selanjutnya selalu mengalami penurunan sehingga pada bulan Mei menjadi 113,54. Namun mulai bulan Juni IHK kembali meningkat menjadi 113,89 sehingga pada bulan Desember mencapai angka tertinggi, yaitu 126,03.

Selanjutnya IHK menurut kelompok pengeluaran (Tabel 3.1.2), IHK terbesar di tahun 2014 terdapat pada kelompok bahan makanan. Pada bulan Januari IHK kelompok bahan makanan ini adalah sebesar 124,76. Namun IHK mengalami penurunan di bulan-bulan berikutnya sehingga di bulan Mei mencapai titik terendah menjadi 116,96. Pada bulan Juni angka IHK kembali meningkat yaitu sebesar 117,14 dan terus mengalami peningkatan sampai di akhir tahun sehingga pada bulan Desember IHK sudah mencapai angka 144,79.

Dengan kondisi IHK yang demikian maka di kota Padang pada kelompok bahan makanan terdapat beberapa bulan yang mengalami deflasi, yaitu bulan-bulan di awal tahun kecuali pada bulan Januari yang mengalami inflasi sebesar 4,89 persen. Inflasi yang tinggi pada bulan Januari

ini akibat dari kenaikan harga yang cukup tinggi pada beras, cabe merah, daging ayam ras, dan tomat sayur. Selanjutnya inflasi terjadi mulai bulan Juni namun dengan angka tidak terlalu besar yaitu 0,15 persen. Inflasi terbesar terjadi di bulan November dengan angka mencapai 9,61 persen. Pada awal bulan November ini pemerintah telah menaikkan harga BBM sebesar dua ribu rupiah per liter. Kenaikan ini memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya seperti terutama pada kelompok bahan makanan.

Pada awal tahun 2014 kelompok pengeluaran kesehatan merupakan kelompok pengeluaran yang paling kecil angka IHK-nya. Namun setiap bulannya IHK pada kelompok kesehatan ini selalu mengalami peningkatan dan di bulan Desember mencapai angka 114,84 sehingga laju inflasi menjadi cukup tinggi yaitu sebesar 8,97 persen.

Secara tahunan peningkatan IHK yang paling rendah terdapat pada kelompok sandang. Pada awal tahun atau pada bulan Januari IHK tercatat

sebesar 108,02 dan inflasi sebesar 0,41 persen. Selanjutnya angka IHK pada kelompok ini berfluktuasi dengan IHK terbesar terdapat di bulan Agustus dengan angka 110,24. Sedangkan IHK pada bulan Desember tercatat sebesar 106,98 sehingga laju inflasi pada kelompok sandang pada tahun 2014 adalah -0,56 persen

IHK yang juga termasuk tinggi di tahun 2014 ditemui pada kelompok transpor dan komunikasi. Kondisi yang sama dengan kelompok bahan makanan juga terjadi pada kelompok transpor dan komunikasi, yaitu IHK yang berfluktuasi. Pada bulan Januari IHK kelompok transpor dan komunikasi adalah sebesar 118,72 sedangkan pada bulan Desember mencapai 133,23. Dengan demikian laju inflasi pada kelompok transpor dan komunikasi menjadi cukup tinggi yakni mencapai angka 13,78 persen, dengan inflasi terbesar terdapat pada bulan Desember sebesar 7,26 persen, setelah sebelumnya di bulan November juga mengalami inflasi sebesar 4,32 persen.

Tabel 3.1.2
Indeks Harga Konsumen (IHK) , Inflasi, dan Laju Inflasi
Kota Padang Tahun 2014
(2012 = 100)

Bulan	Kelompok Pengeluaran											
	Bahan Makanan			Makanan Jadi, minuman, rokok & Tembakau			Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar			Sandang		
	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	124,76	4,89	4,89	113,28	0,21	0,21	107,01	1,37	1,37	108,02	0,41	0,41
Februari	121,64	-2,50	2,27	113,54	0,23	0,44	106,74	-0,25	1,12	108,57	0,51	0,92
Maret	119,37	-1,87	0,36	113,81	0,24	0,68	106,88	0,13	1,25	108,74	0,16	1,08
April	117,43	-1,63	0,36	114,38	0,50	0,68	107,59	0,66	1,25	107,91	-0,76	1,08
Mei	116,96	-0,40	-1,66	114,47	0,08	1,27	107,62	0,03	1,95	107,78	-0,12	0,19
Juni	117,14	0,15	-1,51	114,79	0,28	1,55	108,70	1,00	2,97	108,08	0,28	0,46
Juli	118,87	1,48	-0,06	115,39	0,52	2,08	109,21	0,47	3,46	110,00	1,78	2,25
Agustus	121,83	2,49	2,43	115,94	0,48	2,57	110,33	1,03	4,52	110,24	0,22	2,47
September	126,58	3,90	6,42	116,75	0,18	2,75	111,15	0,74	5,30	109,37	-0,79	1,66
Oktober	129,82	2,56	9,15	116,31	0,14	2,89	113,50	2,11	7,52	108,93	-0,40	1,25
November	142,30	9,61	19,64	116,42	0,09	2,99	113,89	0,34	7,89	106,57	-2,17	-0,94
Desember	144,79	1,75	21,73	117,22	0,69	3,70	117,21	2,92	11,04	106,98	0,38	-0,56

Lanjutan Tabel 3.1.2

Tahun/ Bulan	Kelompok Pengeluaran											
	Kesehatan			Pendidikan, Rekreasi & Olahraga			Transpor & Komunikasi			Umum		
	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi	IHK	Inflasi	Laju Inflasi
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Januari	105,37	0,17	0,17	108,57	0,24	0,24	118,72	1,39	1,39	114,76	1,89	1,89
Februari	105,80	0,22	0,39	108,59	0,02	0,26	118,76	0,03	1,43	114,03	-0,64	1,24
Maret	106,12	0,30	0,69	108,60	0,01	0,27	118,78	0,02	1,44	113,58	-0,39	0,84
April	106,52	0,38	0,69	108,75	0,14	0,27	119,64	0,72	1,44	113,48	-0,09	0,84
Mei	107,45	0,87	1,95	109,46	0,65	1,06	120,05	0,34	2,53	113,54	0,05	0,81
Juni	107,54	0,08	2,04	109,48	0,02	1,08	120,02	-0,02	2,50	113,89	0,31	1,12
Juli	108,10	0,52	2,57	109,53	0,05	1,13	120,70	0,57	3,08	114,81	0,81	1,94
Agustus	109,15	0,97	3,57	113,85	3,94	5,11	124,34	3,02	6,19	116,91	1,83	3,80
September	109,81	0,60	4,19	114,13	0,25	5,37	118,90	-4,38	1,55	117,30	0,33	4,15
Oktober	110,74	0,85	5,08	114,52	0,34	5,73	119,07	0,14	1,69	118,68	1,18	5,37
November	114,58	3,47	8,72	114,40	-0,10	5,62	124,21	4,32	6,08	122,76	3,44	8,99
Desember	114,84	0,23	8,97	116,38	1,73	7,45	133,23	7,26	13,78	126,03	2,66	11,90

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Padang 2005 -2014, BPS Prov. Sumatera Barat

Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar juga mempunyai laju inflasi yang melampaui dua digit. Inflasi yang cukup tinggi terdapat di bulan Oktober dan Desember, dengan masing-masingnya adalah sebesar 2,11 dan 2,92 persen. Walaupun pada bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,25, namun pada tahun 2014 kelompok tersebut telah mempunyai laju inflasi mencapai 11,04 persen.

Pada tahun 2014, perubahan IHK umum di kota Padang terdapat dalam dua kondisi, yaitu tiga bulan mengalami deflasi dan sembilan bulan mengalami inflasi. Bulan yang mengalami deflasi itu adalah bulan Februari (-0,64 persen), Maret (-0,39 persen), dan April (-0,09 persen). Diantara sembilan bulan yang mengalami inflasi, yang merupakan perubahan IHK yang besar terdapat pada bulan November (3,44 persen) dan Desember (2,66 persen). Penyumbang inflasi terbesar pada bulan November berasal dari kelompok bahan makanan dengan inflasi mencapai 9,61 persen, kelompok transpor dan komunikasi

(4,32 persen) dan kelompok kesehatan (3,47 persen). Pada bulan Desember kenaikan IHK dipicu oleh inflasi yang tinggi pada kelompok transpor dan komunikasi (7,26 persen) dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (2,92 persen).

Penghitungan inflasi di kota Padang merupakan salah satu dari penghitungan di 82 kota di Indonesia yang dijadikan dasar penghitungan angka inflasi nasional. Angka inflasi ini didapatkan dari penghitungan perubahan angka IHK dari suatu waktu ke waktu lainnya, misalnya dalam bulanan ataupun tahunan.

Sampai dengan tahun 2012 laju inflasi di kota Padang mengalami penurunan. Namun kondisi yang menggembirakan di tahun itu sayang sekali tidak berlanjut di tahun berikutnya. Pada tahun 2012 laju inflasi berada pada angka terendah pada periode 2010 - 2014, yaitu 4,16 persen. Angka inflasi yang rendah memberi indikasi ke arah yang lebih baik bagi pembangunan negara Indonesia. Inflasi yang rendah akan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi lebih baik sehingga

perekonomian akan berjalan makin bergairah. Daya beli yang membaik ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin tinggi.

Inflasi yang cukup terkendali merupakan kondisi yang sangat diharapkan. Untuk itu perlu kerjasama dari berbagai pihak misalnya Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya. Dengan terjaganya inflasi maka ini akan berpengaruh baik pada berbagai hal, antara lain kemiskinan bisa menjadi lebih rendah, pengangguran berkurang sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih optimal.

Pada tahun 2013 dan 2014 inflasi di kota Padang kembali meningkat bahkan mencapai dua digit. Inflasi di tahun 2013 tercatat sebesar 10,34 persen, sedangkan pada tahun 2014 makin meningkat menjadi 11,90 persen.

Kondisi yang terjadi pada tahun 2014 merupakan akibat kenaikan harga BBM di awal bulan November yang menyebabkan angka inflasi mengalami kenaikan hingga mencapai dua digit. Inflasi umum di kota Padang tercatat sebesar 10,87 persen atau merupakan yang tertinggi di periode lima tahun terakhir ini.

Tabel 3.1.3
Laju Inflasi Kota Padang 2010-2014

Kelompok	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	7,84	5,37	4,16	10,34	11,90
Bahan Makanan	19,13	5,25	0,27	17,53	21,73
Makanan jadi,minuman,rokok&tembakau	5,69	8,08	8,18	9,06	3,70
Perumahan	1,74	3,72	2,95	4,94	11,04
Sandang	3,33	14,24	6,95	4,43	-0,56
Kesehatan	4,00	5,05	3,77	4,25	8,97
Pendidikan, rekreasi & Olahraga	3,88	5,95	12,31	1,42	7,45
Transportasi & komunikasi	2,93	1,28	4,13	15,58	13,78

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Padang 2005-2014, BPS Prov. Sumatera Barat

Pada tahun 2013 semua kelompok pengeluaran memberikan andil dalam peningkatan laju inflasi. Kelompok pengeluaran terbesar laju inflasinya adalah kelompok transportasi dan komunikasi dengan angka inflasi mencapai 19,00 persen. Kelompok bahan makanan menempati urutan kedua, yakni sebesar 16,21 persen. Sedangkan yang paling kecil laju inflasi di tahun 2012 adalah yang berasal dari kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yakni sebesar 1,83 persen. Kondisi ini sedikit berbeda dengan keadaan tahun 2012 dimana kelompok bahan makanan berada pada urutan terkecil, yaitu sebesar 0,27 persen, sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga justru memiliki laju inflasi terbesar yakni sebesar 12,31 persen.

3.2. Harga Produsen di Tingkat Petani dan Nilai Tukar Petani Selama Periode 2010-2014

Pertanian merupakan sektor yang utama di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hal ini juga tercermin dari

sumbangan sektor pertanian setiap tahunnya terhadap PDRB Sumatera Barat yang merupakan paling besar dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2014 sumbangan sektor pertanian ini mencapai 25,04 persen terhadap total PDRB Sumatera Barat. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2014 juga menunjukkan bahwa 30,51 persen penduduk Sumatera Barat yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan di sektor pertanian, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani digunakan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Mulai bulan Desember tahun 2013 penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2012 (2012=100), sedangkan sebelumnya digunakan tahun dasar 2007 untuk menghitung NTP (2007 = 100).

Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu ukuran

perubahan harga-harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk barang-barang hasil produksinya. Dari It ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang atau merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum *form gate* atau disebut juga sebagai harga di sawah/ladang setelah pemetikan.

Rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) di Sumatera Barat selama pada tahun 2010 – 2014 masih menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Selama periode tersebut It selalu mengalami peningkatan, walaupun dengan persentase perubahan yang berbeda-beda. Pada tahun 2010 nilai It tercatat sebesar 132,98 atau terjadi peningkatan sebesar 6,4 persen dan terus meningkat di tahun 2011 dengan nilai It semakin membaik (141,61).

Pada tahun 2012 nilai It Sumatera Barat adalah 144,54 dengan perubahan sebesar 2,5 persen. Perubahan di tahun tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang memiliki perubahan 6,1 persen. Dan pada tahun 2013 It mencapai angka 150,29, dan perubahan It sedikit membaik yaitu sebesar 4,0 persen. Perubahan It yang besar menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan penerimaan petani makin membaik. Selanjutnya pada tahun 2014 dengan menggunakan tahun dasar 2012 = 100 terjadi perubahan It sebesar 12,54 persen bila dibanding dengan tahun dasar. Pada tahun tersebut It adalah sebesar 112,54.

Tabel 3.2
Rata-rata Indeks Harga Yang Diterima Petani (It),
Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) Dan Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Sumatera Barat, 2010-2014 (2007 = 100 dan 2012 = 100)

Tahun	It	Perubahan (%)	Ib	Perubahan (%)	NTP	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	132,98	6,4	126,07	4,6	105,48	1,7
2011	141,05	6,1	132,75	5,3	106,25	0,7
2012	144,54	2,5	137,63	3,7	105,03	-1,1
2013	150,29	4,0	144,23	4,8	104,21	-0,8
2014*)	112,54	-	111,85	-	100,66	-

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Catatan : *) tahun dasar 2012 = 100

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada harga rata-rata yang dibayar petani untuk barang dan jasa, baik yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangganya maupun biaya keperluan produksi pertaniannya. Selama periode tahun 2010-2014 di Sumatera Barat angka Ib menunjukkan trend yang sama dengan It, yaitu selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti secara rata-rata harga yang harus dibayar petani untuk barang dan jasa yang diperlukannya ternyata juga selalu meningkat namun dengan peningkatannya berfluktuasi.

Pada tahun 2014 angka Ib Sumatera Barat adalah 111,85. Dibanding tahun dasar, telah terjadi perubahan sebesar 11,85 persen.

Nilai tukar petani (NTP) yang didapatkan dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) secara umum menghasilkan 3 (tiga) macam pengertian umum. Jika nilai NTP yang diperoleh lebih besar dari 100 berarti daya beli masyarakat petani lebih baik dari tahun dasar, atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari tahun dasar. Keadaan sebaliknya akan terjadi

apabila nilai NTP lebih kecil dari 100, dimana petani mengalami defisit sehingga tingkat kesejahteraan petani akan mengalami penurunan. Sedangkan jika nilai NTP sama dengan 100 berarti tidak ada perubahan daya beli masyarakat petani dibandingkan dengan tahun dasar.

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) di Sumatera Barat pada periode 2010-2014 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada lima tahun terakhir tersebut kondisi petani menunjukkan keadaan yang masih belum terlalu baik. Hal ini memberi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan petani masih belum seperti yang diharapkan.

Nilai NTP di Sumatera Barat yang berfluktuasi juga menyebabkan peningkatan NTP-nya berada pada keadaan yang berfluktuasi juga. Pada awal periode atau pada tahun 2010 NTP tercatat sebesar 105,48 dengan perubahan sebesar 1,7 persen dibanding tahun sebelumnya.

NTP yang berada pada angka di atas 100 yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan petani

dibanding tahun dasar. NTP pada tahun 2010 merupakan perubahan terbaik dalam periode 2010-2014. Walaupun di tahun 2011 masih terjadi peningkatan NTP menjadi 106,25 namun peningkatan ini mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,7 persen. Selanjutnya dalam tiga tahun terakhir masa periode terjadi penurunan NTP secara terus menerus.

Hasil perhitungan NTP pada tahun 2012 didapatkan bahwa NTP Sumatera Barat adalah 105,03. Dengan nilai tersebut berarti terjadi pengurangan NTP atau telah terjadi penurunan sebesar -1,1 persen. Sedangkan di tahun 2013 penurunan berlanjut dengan nilai NTP sebesar 104,21 atau penurunan kembali sebesar 0,8 persen. Dan pada akhir periode NTP tercatat sebesar 100,66 atau naik 0,66 persen dibanding tahun dasar. Kondisi ini merupakan hal belum menggembirakan karena petani makin belum terjadi peningkatan kesejahteraan.

3.3. Laju Inflasi di Pedesaan

Tingkat laju inflasi di pedesaan dapat diukur dengan menggunakan

perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Dari hasil perhitungan Ib pada tahun 2014 di Sumatera Barat didapatkan bahwa laju inflasi di pedesaan sejalan dengan laju inflasi di Kota Padang.

Tahun 2014 didapatkan perubahan Ib adalah 11,85 persen dibanding tahun dasar. Dari nilai Ib ini diketahui bahwa bila dibandingkan dengan perhitungan inflasi di kota Padang yang tercatat sebesar 11,90 persen, di pedesaan terjadi keadaan yang hampir sama. Inflasi yang terjadi di pedesaan menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di pedesaan juga mengalami peningkatan hampir sama dengan di perkotaan.

<http://sumbar.bps.go.id>

4

EKSPOR DAN IMPOR

- ✧ **EKSPOR**
- ✧ **IMPOR**
- ✧ **NERACA PERDAGANGAN**

Kegiatan ekspor impor merupakan agenda wajib dalam perdagangan setiap negara karena ekspor impor sangat penting untuk melakukan pertukaran berupa barang atau jasa. Dengan kata lain, ekspor impor dilakukan untuk menutupi kekurangan ketersediaan produk suatu negara. Ekspor adalah sebuah kegiatan menjual barang maupun jasa pada negara lain. Sementara itu impor merupakan kegiatan yang dilakukan sebaliknya, yaitu kegiatan membeli barang maupun jasa dari negara lain. Dengan bahasa yang lebih sederhana, ekspor berarti kegiatan menjual dan impor kegiatan membeli.

Kegiatan ekspor impor dapat menghasilkan pemasukan bagi negara yang disebut devisa. Devisa adalah proses masuknya uang asing ke suatu negara yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran produk impor barang maupun jasa. Kegiatan ekspor impor tentu saja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menambah devisa. Jika negara merasa kekurangan suatu produk maupun jasa atau memang sama sekali tidak menghasilkan produk tersebut, dilakukanlah kegiatan impor.

Sebaliknya jika negara mampu menghasilkan produk tertentu dalam jumlah melimpah dan dibutuhkan negara lain, dilakukanlah kegiatan ekspor. Pada dasarnya, kegiatan ekspor impor dapat menguntungkan kedua negara yang melakukan transaksi atau kerja sama demi pemenuhan kebutuhan rakyat.

Selama periode Januari-Desember 2014, nilai ekspor nasional tercatat sebesar US\$ 176,29 miliar atau lebih rendah dari impor yang mencapai US\$ 178,18 miliar. Secara umum, nilai ekspor Indonesia turun 3,43 persen pada 2014, sedangkan impor susut 4,53 persen. Sehingga dengan demikian secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia pada 2014 mencatatkan defisit US\$ 1,89 miliar, walaupun pemerintah telah merevisi target ekspor tahun 2014 sebagai respon atas penurunan pertumbuhan perdagangan dunia dan harga komoditas utama ekspor Indonesia. Target ini direvisi dari semula USD 190 miliar menjadi USD 184,3 miliar. Selain itu, ekonomi beberapa negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia mengalami pelemahan pada triwulan II 2014

dibanding triwulan I 2014. Negara tujuan itu antara lain Korea Selatan, Singapura, Jerman, Rusia, dan Jepang. Hal ini pun menyebabkan penurunan realisasi ekspor nonmigas ke negara tujuan utama. Selain itu, pertumbuhan impor negara prospektif tujuan ekspor Indonesia umumnya turun, kecuali Taiwan, Iran, Meksiko, dan Nigeria, sehingga akan mempengaruhi pencapaian target ekspor Indonesia 2014. Namun demikian, masih ada peluang untuk mencapai target ekspor di tengah lesunya perdagangan dunia. Ekonomi Amerika Serikat (AS) telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tingkat pengangguran AS mulai menurun sebesar 5,9 persen pada bulan September dan penciptaan lapangan pekerjaan juga meningkat di beberapa sektor, seperti sektor bisnis jasa, ritel, dan lain-lain.

Pada tahun 2014 kinerja ekspor terus berusaha bangkit dan menguat. Tahun tersebut merupakan tahun yang masih cukup berat bagi kinerja ekspor impor secara nasional termasuk juga di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu dipicu oleh kondisi ekonomi global seperti yang dialami negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat,

yang sampai saat ini belum menemukan titik terang penyelesaiannya. Parahnya krisis yang melanda *Benua Putih* dan *Benua Merah* itu telah menjalar ke urat perekonomian hingga ke Asia. Akibatnya, permintaan dari sektor industri yang menggunakan bahan baku dari Indonesia seperti India dan China secara tak langsung menjadi semakin berkurang. Padahal negara-negara tersebut saat ini merupakan pasar potensial bagi Indonesia umumnya dan khususnya bagi Sumatera Barat dalam memasarkan komoditi unggulan seperti halnya *Crude Palm Oil* (CPO) ataupun yang lainnya.

Pertumbuhan nilai atau volume ekspor-impor rata-rata pertahun atau trend pertumbuhan jangka panjangnya menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja perdagangan Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia yang positif dapat dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara pesaingnya, atau oleh trend pertumbuhan jangka panjangnya yang meningkat. Trend pertumbuhan jangka panjang yang meningkat

mencerminkan perubahan jangka panjang yang positif dari tingkat daya saing produk tersebut didalam perdagangan global.

Di beberapa pasar utama ekspor Indonesia sudah tercapai pemulihan ekonomi dalam pengertian sudah ada pertumbuhan positif di beberapa negara besar tapi belum bisa dipastikan apakah pertumbuhan positif di negara-negara itu akan terus berkesinambungan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia karena kinerja ekspor bukan semata-mata tergantung dari kemampuan ekspor kita melainkan juga dari negara penerima ekspor.

Di masa mendatang pasar Asia akan tetap menjadi tumpuan pertumbuhan ekspor Indonesia mengingat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu diprediksi lebih tinggi dibanding negara tujuan ekspor utama Indonesia di wilayah lain (Amerika dan Eropa). Di masa tersebut diperkirakan ekspor ke tujuan baru seperti China, India dan Korea akan semakin kuat seiring pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Sementara itu, pemerintah akan berupaya mempertahankan pangsa ekspor ke negara tujuan ekspor tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang. Perdagangan ke negara tersebut dilakukan dengan tidak terlalu berharap pertumbuhannya tinggi karena pertumbuhan ekonominya walaupun sudah terjadi tapi masih dalam tingkat yang rendah.

Berbagai upaya telah dilaksanakan agar kinerja ekspor tetap meningkat, seperti dengan upaya diversifikasi negara tujuan ekspor, namun peningkatan ekspor nasional masih belum seperti yang diharapkan. Tiga pangsa ekspor utama Indonesia saat ini adalah negara Jepang, USA, dan Uni Eropa negara tersebut merupakan penyumbang perekonomian dunia. Dengan terjadinya krisis global, diversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia diarahkan ke pasar yang tidak terpengaruh pertumbuhannya seperti negara China, India, dan Korea.

Saat ini penggunaan instrumen perdagangan internasional berupa tuduhan *dumping*, subsidi, dan

safeguard sudah banyak dilakukan negara maju maupun berkembang. Hambatan-hambatan dalam perdagangan luar negeri ini bila tidak ditangani dapat mengakibatkan produk ekspor Indonesia kalah bersaing. Karena penggunaan bea masuk anti-dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta *holding order* dan *automatic detention*. Sehingga harga ekspor produk Indonesia menjadi mahal. Sedangkan dampak dari hambatan teknis perdagangan terjadinya pelarangan atau pemusnahan produk ekspor tersebut di negara tujuan. Juga, hambatan berupa *wanprestasi* yang membuat nama baik eksportir Indonesia menjadi jelek.

Praktik perdagangan internasional yang ditetapkan WTO atau organisasi perdagangan dunia, implementasinya belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini terbukti dari masih banyaknya negara sesama anggota WTO memproteksi produsen atau industri dalam negerinya secara samar dengan mengangkat isu hambatan teknis perdagangan,

terutama untuk produk-produk kompetitif.

Peluang Sumatera Barat mengeksport produknya terbuka lebar. Peralnya, Sumbar tidak memiliki kasus-kasus *trade remedies*, seperti tuduhan *dumping*, subsidi, dan *saveguard* dalam perdagangan internasional. Dulu pernah ada kasus ekspor berupa semen, tapi sekarang tidak ada. Namun, bukan berarti perdagangan luar negeri Sumatera Barat bebas hambatan. Sebab, masing-masing negara tujuan ekspor menerapkan kebijakan tertentu sebagai hambatan teknis dalam melindungi impor ke negaranya, seperti standarisasi barang-barang impor tersebut.

Sementara untuk tahun mendatang pemerintah Sumatera Barat telah mengalokasikan dana sebesar 1,5 milyar rupiah untuk membiayai program peningkatan dan pengembangan ekspor dari daerah itu. Peningkatan dan pengembangan ekspor salah satunya untuk mensiasati dampak krisis ekonomi global yang sempat mengakibatkan turunnya kegiatan dan nilai ekspor dari daerah

ini. Untuk mengatasi dampak meluasnya dampak krisis global pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mencari pasar alternatif untuk komoditas ekspor andalan daerah ini. Selain itu juga mendorong produk lainnya diluar komoditi yang terdampak krisis ekonomi tersebut untuk dapat masuk pangsa pasar internasional.

Selain dampak krisis ekonomi global, penurunan ekspor komoditas non migas juga dipengaruhi oleh masih rendahnya daya saing produk yang dijual yang masih relatif rendah. Untuk mengatasi hal itu, dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan peningkatan mutu produk di tingkat petani melalui penyuluhan dan sosialisasi standar mutu produk sesuai dengan permintaan pasar ekspor.

4.1. Ekspor

Secara total nilai ekspor Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 2,10 milyar US \$. Dibanding dengan tahun sebelumnya, besaran ekspor tersebut kurang mengembirakan karena pada tahun 2013 nilai ekspor lebih tinggi, yaitu

tercatat sebesar 2,21 milyar US \$. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 telah terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 4,68 persen.

Penurunan nilai ekspor dari provinsi Sumatera Barat tersebut sejalan dengan penurunan volume ekspor. Tahun 2014 volume ekspor adalah sebesar 3,99 juta ton, sementara itu pada tahun 2013 volume ekspor sudah mencapai 4,60 juta ton atau mengalami penurunan volume ekspor sebesar 13,10 persen. Terjadinya penurunan total volume ekspor diiringi nilai impor juga mengalami penurunan menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan beberapa harga komoditi asal Sumatera Barat di pasaran dunia. Komoditi-komoditi yang mengalami penurunan harga itu antara lain adalah karet remah, minyak biji kelapa sawit, dan biji coklat.

Berdasarkan jenis komoditi, ekspor Sumatera Barat masih didominasi oleh ekspor hasil industri. Pada tahun 2014, nilai ekspor dari hasil industri mencapai 2,00 milyar US \$ atau 95,04 persen dari total ekspor Sumatera Barat. Nilai ekspor

tersebut berkurang dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun 2013 nilai ekspor hasil industri sudah mencapai 2,05 milyar US \$ (92,79 persen dari total ekspor).

Sampai saat ini ekspor hasil industri yang berasal dari pengolahan hasil pertanian masih mendominasi atau merupakan primadona ekspor Sumatera Barat. Ekspor utama dari kelompok tersebut adalah komoditi minyak kelapa sawit. Pada tahun 2014 telah diekspor sebanyak 1,77 juta ton minyak kelapa sawit dengan nilai 1,32 milyar US \$. Sementara itu pada tahun 2013 minyak kelapa sawit diekspor sebanyak 1,56 juta ton dengan nilai 1,19 milyar US \$. Pada kondisi tersebut, volume ekspor minyak kelapa sawit meningkat sebesar 13,61 persen, sedangkan nilai ekspor juga meningkat sebesar 13,37 persen.

Setelah minyak kelapa sawit, terdapat dua komoditi industri pengolahan hasil pertanian yang juga menonjol nilai ekspornya. Kedua hasil industri tersebut adalah *crumb rubber* (karet remah) dan minyak biji kelapa sawit. Pada tahun 2014 masing-

masing komoditi tersebut telah diekspor senilai 406,65 juta US \$ dan 84,31 juta US \$.

Situasi yang sama dengan ekspor hasil industri terjadi pada hasil pertanian yang juga mengalami penurunan di tahun 2014 dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 tercatat ekspor hasil pertanian Sumatera Barat sudah mencapai 58,44 juta US \$, sementara itu di tahun 2014 berkurang menjadi 49,31 juta US \$ atau terjadi penurunan ekspor hasil pertanian dari Sumatera Barat sebesar 15,62 persen.

Walaupun mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2014 biji coklat masih merupakan hasil pertanian yang paling dominan dari Sumatera Barat. Pada tahun 2014 sebanyak 3,42 ribu ton biji coklat telah diekspor atau setara dengan nilai 10,40 juta US \$. Sementara itu di tahun sebelumnya biji coklat diekspor dengan volume yang lebih banyak, yaitu sebanyak 14,70 ribu ton dan dengan nilai ekspor 35,01 juta US \$.

Selain biji coklat, hasil pertanian utama yang diekspor dari Sumatera Barat adalah buah-buahan

serta kayu manis dan bunganya. Pada tahun 2014 ekspor kedua komoditi tersebut masing-masing sebesar 8,08 ribu ton dan 2,40 ribu ton dengan nilai 9,48 dan 5,87 juta US \$. Pada tahun 2013 ekspor buah-buahan dan kayu manis dan bunganya sama-sama menempati urutan yang sama dengan kondisi tahun 2014 dalam nilai ekspor. Pada tahun 2013 tersebut buah-buahan diekspor sebanyak 7,03 ribu ton dengan nilai 5,12 juta US \$, sedangkan kayu manis dan bunganya diekspor sebanyak 2,13 ribu ton atau senilai 3,81 juta US \$.

Selain dari hasil perkebunan, yang juga makin menunjukkan eksistensi sebagai ekspor asal Sumatera Barat adalah dari hasil perikanan atau kelautan. Jenis ikan yang paling menonjol diekspor adalah ikan tongkol/tuna yang pada tahun 2013 telah diekspor sebanyak 35,98 ton atau senilai 116,80 ribu US \$. Namun demikian, sayang sekali ekspor di tahun 2014 mengalami penurunan pada nilainya menjadi 77,38 ribu US \$, sekalipun volume

meningkat menjadi 145,32 ton ini. Selain tongkol/tuna terdapat juga jenis komoditi perikanan lainnya yang diekspor dari Sumatera Barat seperti kepiting, kerang-kerangan, ataupun jenis ikan lainnya.

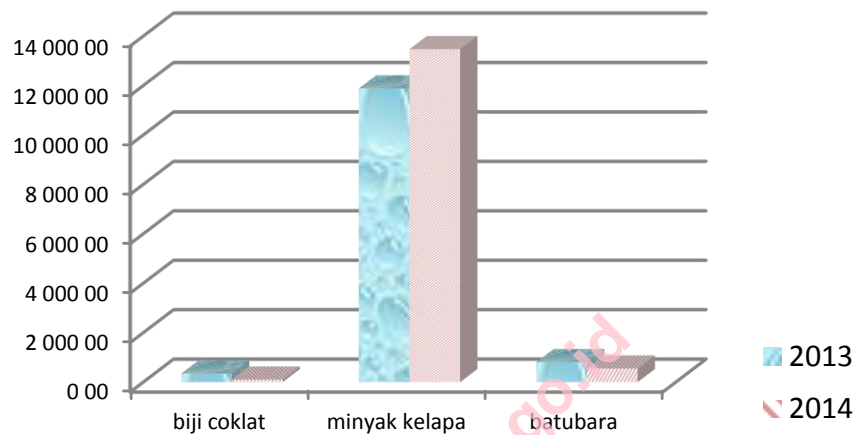
Sama halnya dengan kondisi pada tahun sebelumnya, di tahun 2014 nilai ekspor hasil pertambangan menempati urutan ke dua setelah ekspor hasil industri. Pada tahun 2014 ekspor hasil pertambangan menunjukkan hasil yang kurang mengembirakan bila dibandingkan dengan ekspor tahun 2013. Pada tahun 2014 telah diekspor hasil pertambangan sebanyak 1,12 juta ton atau setara dengan nilai 55,03 juta US \$. Sementara itu pada tahun 2013 ekspor hasil pertambangan sebanyak 1,91 juta ton atau senilai 100,74 juta US \$. Penurunan ekspor hasil pertambangan ini terjadi karena hanya batubara yang diekspor dari Sumatera Barat, sedangkan hasil tambang lainnya pada tahun 2014 tidak ada diekspor lagi.

Tabel 4.1.1
Perkembangan Volume Dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat
Menurut Jenis Komoditi, 2013-2014

Jenis Komoditi	2013		2014	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Hasil Pertanian</u>	224 882,43	58 442,94	318 029,44	49 311,74
1. Biji Coklat	14 703,46	35 014,15	3 418,00	10 398,35
2. Buah-buahan	7 030,60	5 120,77	8 078,45	9 479,41
3. Kayu Manis & Bunganya	2 131,31	3 808,88	2 397,00	5 874,41
4. Kopi	156,60	316,32	429,78	850,46
5. Biji Pala & Bunganya & kapulaga	5,90	69,34	6,23	28,52
6. Ikan Tongkol / Tuna	35,98	116,80	145,32	77,38
7. Biji Lainnya	158 892,19	0,00	249 170,52	18 729,34
8. Ikan Lainnya	26,28	90,06	43,55	105,52
9. Kepiting, Kerang-kerangan	0,13	0,78	-	-
10. Udang Segar/Beku	-	0,00	-	-
11. Hasil Pertanian Lainnya	41 899,98	13 905,84	54 340,59	3 768,35
<u>Hasil Industri</u>	2 457 136,03	2 049 825,22	2 559 417,81	2 001 275,55
1. Minyak Kelapa Sawit	1 561 050,57	1 188 290,10	1 773 494,98	1 347 178,8
2. Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)	225 676,22	570 379,50	226 130,94	406 650,82
3. Minyak Biji Kelapa Sawit	119 192,44	93 667,11	82 438,08	84 306,01
4. Crepe	15 823,08	40 773,72	11 954,88	21 878,31
5. Asam berlemak lainnya	31 859,17	19 273,25	48 513,74	34 905,21
6. Minyak Atsiri Lainnya	150,90	11 316,29	159,76	12 289,98
7. Makanan Olahan	12 972,32	16 055,89	18 213,82	29 630,71
8. Buah/Sayuran Olahan	4 950,45	5 629,08	4 234,36	7 135,14
9. Minuman Olahan	4 632,00	3 531,21	3 138,83	3 029,90
10. Alat Listrik	311,40	2 154,07	837,69	6 925,96
11. Semen	75 591,28	3 825,22	115 768,35	5 843,72
12. Kayu Lapis	528,20	520,16	610,86	594,85
13. Hasil Industri Lainnya	404 398,00	100 868,04	273 921,52	40 906,07
<u>Hasil Pertambangan</u>	1 914 117,25	100 743,50	1 116 346,77	55 026,17
1. Batu Bara	1 449 747,51	81 269,96	1 116 346,77	55 026,17
2. Biji Tembaga	-	-	-	-
3. Hasil Tambang Lain	464 369,74	19 473,54	-	-
<u>Lainnya</u>	-	-	0,03	0,08
1. Barang Seni	-	-	0,03	0,08
Jumlah	4 596 135,71	2 209 011,66	3 993 794,04	2 105 613,54

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.1.1
Perkembangan Nilai Ekspor Utama Hasil Pertanian, Industri
dan Pertambangan di Sumatera Barat, 2013-2014
 (000 US \$)



Belum membaiknya kinerja ekspor di Provinsi Sumatera Barat tak lepas dari kondisi perekonomian Sumatera Barat secara umum. Selanjutnya kondisi yang makin kurang baik juga dipengaruhi dengan makin melemahnya permintaan ekspor di pasaran dunia terutama dari negara-negara Eropa, India dan Pakistan

Tiga negara tujuan ekspor Sumatera Barat yang utama dewasa ini adalah India, Amerika Serikat (USA) dan Singapura. Ketiga negara tersebut berturut-turut menguasai pangsa pasar sebesar 28,95; 17,57 dan 9,57 persen atau secara bersama ketiga negara tersebut menerima ekspor Sumatera Barat sebesar 56,09 persen.

Posisi pertama dari negara tujuan ekspor Sumatera Barat sampai tahun 2014 masih ditempati oleh negara India. Pada tahun 2014 ekspor ke India tercatat sebesar 609,58 juta US \$, namun menurun dibanding tahun 2013 yang telah mencapai 726,60 juta US \$.

Selanjutnya tujuan ekspor Sumatera Barat yang menempati urutan kedua adalah negara Amerika Serikat (USA). Pada tahun 2014 terjadi pengurangan nilai ekspor ke Amerika bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 ekspor sudah mencapai 526,68 juta US \$ sedangkan pada tahun 2014 berkurang menjadi 370,05 juta US \$.

Kelompok negara ASEAN merupakan pangsa pasar komoditi Sumatera Barat yang potensial. Selama tahun 2014, ekspor Sumatera Barat ke negara-negara ASEAN adalah sebesar 294,00 juta US \$. Dibanding tahun 2013, nilai ekspor mengalami penurunan, karena di tahun tersebut telah mencapai 312,35 juta US \$. Negara ASEAN utama yang merupakan tujuan ekspor Sumatera Barat sampai dengan tahun 2014 adalah negara Singapura, dengan nilai ekspor mencapai 201,41 juta US \$, namun menurun dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 225,47 juta US \$ dan menempatkan Singapura pada urutan ketiga sebagai negara penerima ekspor Sumatera Barat. Selain Singapura, tujuan ekspor utama lainnya di kawasan ASEAN adalah negara serumpun Malaysia dengan nilai ekspor pada tahun 2014 mencapai 70,99 juta US \$, yang berarti meningkat dibanding tahun 2013 yang baru mencapai 45,99 juta US \$.

China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ternyata juga merupakan negara

penerima ekspor utama dari Sumatera Barat. Pada tahun 2014, dengan nilai ekspor sebesar 98,45 juta US \$ China menempati posisi keempat sebagai negara importir produk dari Sumatera Barat. Walaupun untuk tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 151,47 juta US \$, namun ekspor ke China di tahun 2014 tersebut masih memberikan pangsa yang cukup besar (4,68 persen).

Nilai yang cukup menggembirakan terdapat juga pada ekspor Sumatera Barat ke negara Pakistan. Ekspor ke Pakistan pada tahun 2014 mencapai 54,45 juta US \$ atau merupakan 2,59 persen dari total ekspor Sumatera Barat. Walaupun masih menunjukkan nilai yang membanggakan, tapi ekspor ke Pakistan pada tahun 2014 ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sudah senilai 56,18 juta US \$.

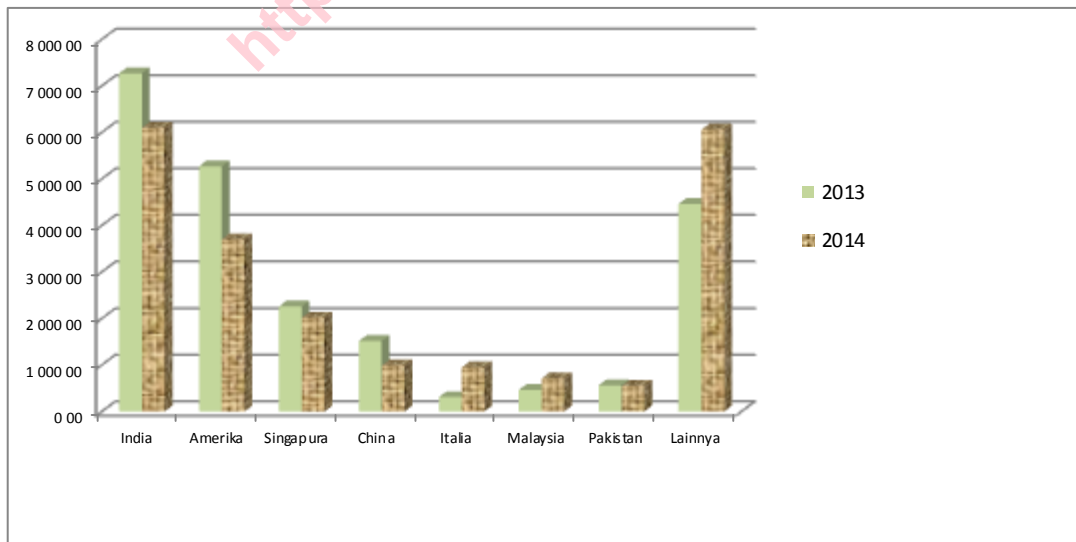
Di tahun 2014 ekspor ke negara Uni Eropa mencapai 228,71 juta US \$, meningkat dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 120,28 juta US \$. Perkembangan ekspor ke negara

Uni Eropa tidak sama antara satu negara dengan yang lainnya, ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan, namun secara umum kondisi pangsa pasar di tahun 2014 meningkat signifikan dibanding dengan keadaan tahun 2013 dengan pangsa pasar pada dua tahun tersebut masing-masingnya sebesar 5,45 dan 10,86 persen.

Negara Uni Eropa yang merupakan pangsa pasar utama

Sumatera Barat adalah negeri Belanda. Sebagai negara yang mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia, ekspor Sumatera Barat ternyata paling banyak dikirim ke negeri kincir angin tersebut dibanding negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2014 ekspor ke negeri Belanda adalah sebesar 60,60 juta US \$, menurun dibanding tahun 2013 yang sudah mencapai 69,60 juta US \$.

Gambar 4.1.2
Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan, 2013-2014
 (000 US \$)



Tabel 4.1.2
Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat
Menurut Negara Tujuan, 2013-2014

Jenis Komoditi	2013		2014	
	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Apec ASEAN	607 490,16	312 352,69	544 344,15	293 996,60
- Singapura	290 346,43	225 474,84	259 368,15	201 413,09
- Malaysia	46 375,27	45 987,83	87 039,52	70 990,28
- Thailand	180 717,08	21 358,29	193 595,96	17 856,24
- Vietnam	109,44	105,41	84,65	152,25
- Myanmar	17 399,92	14 407,93	4 249,88	3 578,40
- Kamboja	72 503,00	4,970,97	-	-
- Brunei Darussalam	39,03	47,42	5,99	6,34
Uni Eropa	173 568,91	108 318,84	508 062,05	228 709,52
- Belanda	91 534,01	69 595,90	89 251,17	60 603,00
- Italia	77 170,85	30 532,60	14 549 832	94 750,74
- Portugal	67,00	77,26	800	20,19
- Jerman	854,42	2 173,87	117 680	2 985,19
- Spanyol	2 772,25	4.520,29	3 071 445	23 691,69
- Perancis	102,04	156,92	17 740	274,54
- Swedia	-	-	5 000	120,15
- Yunani	217,60	246,98	13750	265,08
- Inggris	542,60	623,18	3 064 810	26 409,04
- Belgia	208,14	302,65	131 947	2 318,85
- Denmark	100,00	89,20	7 500	109,10
- Latvia	-	-	122 976	1 987,40
- Irlandia	-	-	1 000 000	690,00
- Polandia	143 027,02	10 475,77	197 450,88	13 926,38
- Estonia	29,60	48,03	50,20	107,11
- Hungaria	12,50	13,75	-	-
- Slovenia	125,00	100,80	275,00	451,06
Apec Nafta	231 426,83	537 965,76	227 483,05	395 294,89
- Kanada	4 420,40	10 621,20	5 026,40	9 003,96
- Amerika Serikat	226 712,85	526 678,43	203 688,42	370 050,37
- Mexico	293,58	666,13	18 768,23	16 240,56
Apec Afta Lainnya	1 073 219,86	205 545,15	484 704,19	142 424,88
- Australia	112,15	180,59	101,52	180,63
- China	659 417,27	151 466,07	189 055,52	98 450,67
- Hongkong	341,66	287,06	19,27	52,27
- Jepang	36 159,05	3 172,69	62 108,34	5 887,16
- Korea, Republic of	148 600,86	15 989,74	26 431,72	2 823,36
- Taiwan, Province of China	1 050,25	2 508,29	3 955,92	6 583,13
- Selandia Baru	227 538,62	31 940,71	203 031,90	28 442,66
Lainnya	2 366 711,67	1 032 864,60	2 229 200,60	1 045 187,65
- India	1 820 842,35	726 598,04	1 561 500,81	609 584,91
- Pakistan	108 150,77	56 179,83	66 089,96	54 448,00
- Negara Lainnya	437 718,55	298 963,03	601 609,83	381 154,74
Jumlah	4 596 135,71	2 209 011,65	3 993 794,04	2 105 613,54

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

4.2. Impor

Impor barang di Sumatera Barat dilakukan melalui dua tempat, yaitu melalui pelabuhan laut dan udara. Barang yang diimpor melalui pelabuhan laut datang dari pelabuhan Muara dan pelabuhan Teluk Bayur. Sedangkan yang dari pelabuhan udara saat ini masuk melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Selama periode tahun 2005-2014 impor barang ke Sumatera Barat menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Namun sejak tahun 2009 terlihat bahwa impor yang dilakukan makin meningkat, dan keadaan pada tahun 2012 merupakan yang terbesar dalam periode tersebut, yaitu sebanyak 1.580.604 ton, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2005 (40.782 ton). Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.444.388 ton, dan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 telah terjadi peningkatan volume ekspor sebesar 8,53 persen.

Seiring dengan berfluktuasinya volume impor barang di Sumatera Barat, pada nilai impor juga ditemui kondisi yang berfluktuasi pada periode 2005 – 2014. Pada tahun 2005 nilai impor mengalami penurunan bila dibanding dengan nilai impor pada awal periode yang tercatat pada angka 15,65 juta US \$, sedangkan pada tahun 2005 hanya 42 ribu US \$. Dan sejak tahun 2006 nilai impor Sumatera Barat mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan pada tahun 2008 nilai impor telah mencapai 476,46 juta US \$. Seiring dengan peningkatan volume impor yang mencapai jumlah tertinggi di tahun 2012, nilai impor juga meningkat menjadi 1,24 milyar US \$. Walaupun volume impor meningkat di tahun 2014, namun nilai impor justru berkurang, yaitu dari 1,035 milyar US \$ di tahun 2013 menjadi 1,034 milyar US \$.

Tabel 4.2.1

Perkembangan Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Impor, 2005-2014

Tahun	Volume (ton)				Nilai (000 US\$)			
	Teluk Bayur	BIM	Muaro/Padang (PTT)	Jumlah	Teluk Bayur	BIM	Muaro/Padang (PTT)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2005	-	900	39 882	40 782	-	16	26	42
2006	254 868	32	-	254 900	36 286	526	-	36 812
2007	531 247	7	-	531 254	95 583	279	-	95 862
2008	856 830	3	0	856 833	476 310	146	1	476 457
2009	656 688	0	-	656 688	346 198	49	-	346 247
2010	1 123 634	1	-	1 123 635	751 285	93	-	751 378
2011	1 300 779	3	-	1 300 782	1 075 141	1 597	-	1 076 738
2012	1 580 358	6	240	1 580 604	1 223 858	2 101	16 968	1 242 927
2013	1 330 877	1	-	1 330 878	1 034 896	109	-	1 035 005
2014	1 444 387	1	-	1 444 388	1 034 515	91	-	1 034 606

Sumber : BPS, Jakarta

Sebagian besar barang impor ke Provinsi Sumatera Barat masuk melalui pelabuhan Teluk Bayur, yang merupakan pelabuhan laut yang utama. Kondisi ini tidak mengalami perubahan selama satu dasawarsa ini. Sama halnya dengan total impor, impor barang dari pelabuhan Teluk Bayur mulai menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2005. Di tahun sebelumnya volume dan nilai impor cenderung berfluktuasi. Walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan impor, namun di tahun selanjutnya pemasukan

barang impor melalui pelabuhan Teluk Bayur selalu meningkat.

Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1,44 juta ton komoditas atau setara dengan nilai 1,034 milyar US \$ diimpor melalui pelabuhan Teluk Bayur. Selanjutnya sebanyak 1 ton atau senilai 90,56 ribu US \$ barang diimpor melalui pelabuhan udara BIM.

Sejak tahun 2010 yang merupakan komoditi dengan volume terbesar yang diimpor ke Sumatera Barat adalah yang termasuk pada golongan barang bahan bakar, bahan penyemir, dsb. Sampai dengan tahun

2012 terjadi peningkatan volume impor setiap tahunnya, namun pada 2013 terjadi sedikit pengurangan volume impor dan terus berlanjut di tahun 2014. Pada tahun 2010 dan 2011 volume impor masing-masingnya tercatat sebesar 781,90 ribu ton dan 817,84 ribu ton dan pada tahun 2012 terdapat volume tertinggi dari barang yang diimpor ke Sumatera Barat yaitu sebanyak 958,74 ribu ton. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi penurunan dalam volume impor bila dibanding dengan tahun sebelumnya menjadi 930,60 ribu ton, dan di tahun 2014 menjadi 891,72 ribu ton.

Selain golongan barang bahan bakar, bahan penyemir dsb, golongan yang termasuk hasil industri pabrik menempati urutan kedua dengan impor sebesar 185,10 ribu ton, diikuti oleh golongan barang bahan baku dan hasil tambang juga mempunyai volume yang besar untuk diimpor.

Pada tahun 2014 golongan barang tersebut diimpor sebanyak 162,77 ribu ton.

Seiring dengan besarnya volume golongan barang yang termasuk bahan bakar, bahan penyemir, dsb yang diimpor ke Sumatera Barat selama tahun 2010-2014, nilai impor terbesar juga ditemui pada golongan tersebut. Pada tahun 2014 tercatat senilai 920,27 juta US \$ golongan barang bahan baku, bahan penyemir, dsb yang diimpor. Nilai impor di tahun 2014 tersebut juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sudah mencapai 950,34 juta US \$.

Tabel 4.2.2
Volume Impor Menurut Barang 1 Digit STIC 2010-2014 (ton)

Kode STIC	Golongan Barang	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bhn Makanan & Binatang Hidup	28 100	78 433	72 067	61 438	108 658
1	Minuman & Tembakau	-	-	-	-	-
2	Bahan baku dan hasil tambang	159 910	187 065	208 853	227 593	162 771
3	Bahan bakar, bahan penyemir, dsb	781 897	817 845	958 736	930 602	891 721
4	Minyak/ lemak nabati dan hewani	-	-	-	-	-
5	Bahan kimia dan produknya	123 603	156 037	70 232	34 095	93 681
6	Hasil industri pabrik	26 344	48 580	253 734	75 494	185 102
7	Mesin dan alat angkutan	3 032	12 752	16 858	1 577	2 442
8&9	Hasil industri dan transaksi lainnya	749	71	124	79	13
Jumlah		1 123 635	1 300 782	1 580 604	1 330 878	1 444 388

Sumber: BPS, Jakarta

Tabel 4.2.3
Nilai Impor Menurut Golongan Barang I Digit STIC 2010-2014 (000 US\$)

Kode STIC	Golongan Barang	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup	15 061	36 375	35 119	23 477	41 670
1	Minuman & Tembakau	-	-	-	-	-
2	Bahan baku dan hasil tambang	6 087	9 894	10 241	9 857	7 571
3	Bahan bakar, bahan penyemir, dsb	604 751	872 448	1 011 046	950 342	920 267
4	Minyak/ lemak nabati dan hewani	-	-	-	-	-
5	Bahan kimia dan produknya	50 220	69 737	35 019	13 432	27 213
6	Hasil industri pabrik	50 716	30 128	50 766	23 948	27 885
7	Mesin dan alat angkutan	21 862	57 765	99 893	13 500	9 957
8&9	Hasil industri dan transaksi lainnya	2 682	391	843	449	14
Jumlah		751 378	1 076 738	1 242 927	1 035 005	1 034 606

Sumber: BPS, Jakarta

4.3. Neraca Perdagangan Sumatera Barat

Mengingat begitu strategisnya peranan perdagangan luar negeri dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang berorientasi ekspor dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang menggairahkan dunia usaha. Diharapkan dengan meningkatnya surplus neraca perdagangan akan menaikkan cadangan devisa negara dan dapat lebih memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Selama periode 2010-2014, neraca perdagangan Sumatera Barat selalu mengalami surplus, karena kinerja ekspor selalu lebih besar daripada kinerja impor. Walaupun neraca perdagangan selalu mengalami

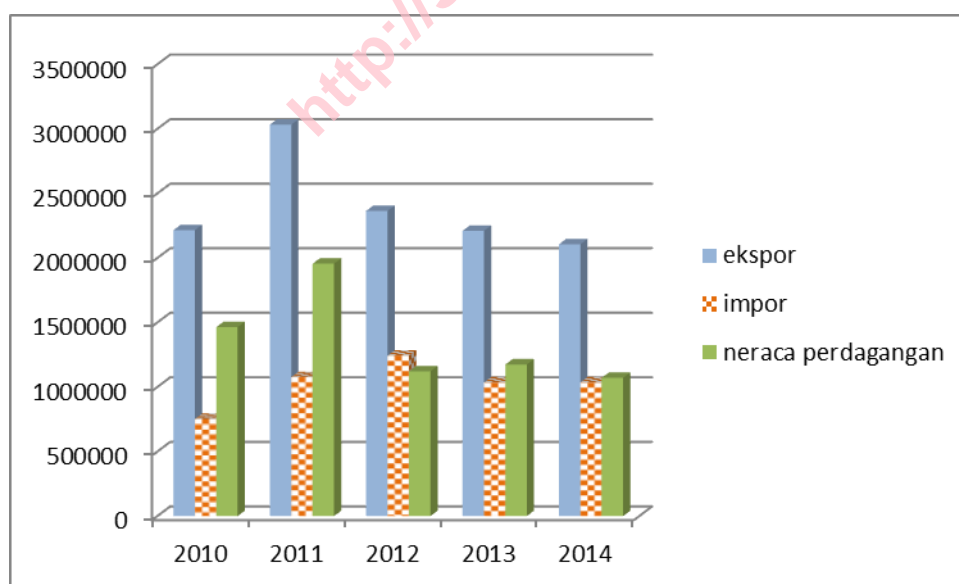
surplus, namun nilainya berfluktuasi. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Sumatera Barat tercatat sebesar 1,46 milyar rupiah dan di tahun 2011 mencapai puncaknya menjadi 1,96 milyar rupiah. Hal ini merupakan indikasi yang baik, karena kinerja ekspor yang lebih baik akan meningkatkan gairah masyarakat untuk berusaha. Namun pada tahun 2012 kondisi ini mengalami sedikit penurunan sehingga neraca perdagangan Sumatera Barat tercatat menjadi 1,12 milyar rupiah. Neraca perdagangan Sumatera Barat sedikit membaik di tahun 2013 menjadi 1,17 milyar US \$, walaupun sama-sama terjadi penurunan dalam nilai ekspor dan impor pada tahun tersebut. Dan di tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi 1,07 milyar US \$.

Tabel 4.3.1
Neraca Perdagangan Sumatera Barat, 2010-2014 (000 US \$)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	2 214 774	751 378	1 463 397
2011	3 031 815	1 076 738	1 955 077
2012	2 363 583	1 242 927	1 120 656
2013	2 209 012	1 035 005	1 174 007
2014	2.105.614	1.034.606	1.071.008

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.3.1
Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sumatera Barat (000 US \$), 2010-2014



5

KEUANGAN DAERAH

- ✧ **KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI**
- ✧ **KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Secara menyeluruh tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan mengikuti program-program yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah menyusun suatu anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana kegiatan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mempunyai tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Dalam APBD tersebut tercakup perencanaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan ini sangat besar, yang bersumber dari potensi daerah tersebut dan sumber lain. Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, kemampuan daerah sangat diperlukan untuk menggali seoptimal mungkin sumber daya yang ada.

5.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat di tahun 2014 menunjukkan kondisi yang makin baik. Di tahun tersebut pendapatan meningkat dibanding tahun sebelumnya, demikian juga halnya dengan belanja yang juga bertambah besar. Seperti halnya pada tahun 2013, pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah lebih besar dibanding dengan belanja daerah.

Pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah mencapai 3,64 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar 3,48 triliun rupiah.

Sedangkan pada tahun 2012 realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 3,15 triliun rupiah dan belanja sebesar 3,11 triliun rupiah.

5.1.1 Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penerimaan atau pendapatan daerah dikelompokkan atas tiga sumber. Ketiga sumber ini adalah pendapatan Asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sama dengan kondisi di tahun sebelumnya, sumber pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terbesar pada tahun 2014 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pada urutan kedua ditempati oleh dana perimbangan. Selanjutnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berada di urutan ketiga. Pada tahun tersebut ketiga jenis pendapatan ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2013.

Pendapatan asli daerah (PAD) terbagi atas empat (4) bagian, yaitu yang berasal dari (1) pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat telah berhasil merealisasikan pendapatan dari PAD sebanyak 1,73 triliun rupiah. Realisasi PAD ini meningkat dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 1,37 triliun rupiah.

Realisasi PAD ini sebagian besar berasal dari pajak daerah dan pada tahun 2014 pajak daerah merupakan 78,33 persen dari total PAD. Dari empat sumber PAD, tiga diantaranya mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 dan hanya realisasi retribusi daerah yang mengalami penurunan. Pada tahun 2014 realisasi pajak daerah tercatat sebesar 1,35 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 1,08 triliun rupiah. Selanjutnya realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 34,59 milyar rupiah di tahun 2013 dan pada tahun 2014 berkurang drastis menjadi 15,52 milyar rupiah, yang berarti mengalami penurunan sebesar 55,13 persen. Dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2013 didapatkan PAD sebesar 93,87 milyar rupiah, dan makin meningkat pada

tahun 2014 menjadi 94,21 milyar rupiah. Sedangkan pada penerimaan yang termasuk pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga bertambah dari 152,55 milyar rupiah di tahun 2013 menjadi 264,94 milyar rupiah di tahun 2014.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi dari dana perimbangan yang diterima Provinsi Sumatera Barat di tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 tercatat dana perimbangan sebesar 1,24 triliun rupiah, dan pada tahun 2014 dana perimbangan Sumatera Barat menjadi 1,33 triliun rupiah. Sebagian besar dari dana perimbangan adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang di tahun 2014 terealisasi sebesar 1,13 triliun rupiah atau merupakan 84,76 persen dari dana perimbangan. Dana perimbangan yang lainnya adalah dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak yang terealisasi sebesar 149,06 milyar rupiah dan dana alokasi khusus terealisasi sebesar

54,11 milyar rupiah di tahun yang sama. Dari ketiga kelompok dana perimbangan ini yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya ada dua, yaitu pada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum (DAU), sedangkan dana alokasi khusus (DAK) justru berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 tercatat dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan DAU masing-masingnya berjumlah 149,06 milyar rupiah dan 1,13 triliun rupiah, sedangkan DAK tercatat sebesar 54,11 milyar rupiah.

Pendapatan daerah yang termasuk pada lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2014 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Pada tahun 2014 penerimaan daerah dari kelompok ini adalah sebesar 573,56 milyar rupiah, sementara itu di tahun 2013 berjumlah 540,78 milyar rupiah. Dan pendapatan daerah tersebut pada tahun 2014 sama kondisi dengan keadaan tahun 2013, yaitu hanya terealisasi atas dua macam, yaitu hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada tahun 2013 hibah terealisasi

sebesar 8,93 milyar rupiah, kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi 11,61 milyar rupiah. Sementara itu dana penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2013 tercatat sebesar 531,85 milyar rupiah, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 561,95 milyar rupiah. Sedangkan dana darurat dan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya tidak ada realisasinya pada APBD Sumatera Barat.

5.1.2 Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara garis besar digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk operasional guna penyelenggaraan roda pemerintahan. Selanjutnya hal ini akan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Laporan realisasi APBD tahun 2014 menyatakan bahwa belanja daerah pemerintah Sumatera Barat adalah sebesar 3,48 triliun rupiah. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2013

yang terealisasi sebanyak 3,11 triliun rupiah atau pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 11,90 persen.

Belanja daerah dalam APBD dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidak adanya program/kegiatan, biasanya digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat umum, misalnya gaji pegawai, biaya listrik, biaya telepon, ada atau tidak ada program/kegiatan tetap harus dibayar. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Tabel 5.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013-2014 (rupiah)

Uraian	Tahun	
	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
<u>PENDAPATAN DAERAH</u>		
Pendapatan Asli Daerah	1 366 178 102 013	1 729 222 284 040
Pajak Daerah	1 085 164 285 343	1 354 541 147 330
Retribusi daerah	34 595 713 325	15 521 509 188
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yg dipisahkan	93 871 534 536	94 207 474 690
Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah	152 546 568 809	264 942 152 832
Dana Perimbangan	1 240 879 867 358	1 333 059 018 233
Dana Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak	137 015 381 558	149 064 512 233
Dana Alokasi Umum	1 039 922 511 000	1 129 886 306 000
Dana Alokasi Khusus	63 941 974 800	54 108 200 000
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	540 782 389 877	573 556 458 547
Hibah	8 927 774 760	11 609 464 229
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dr Provinsi & Pemda lainnya	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	531 854 615 117	561 946 994 318
Bantuan keuangan dari Pemda Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan	3 147 840 359 248	3 635 837 760 820
<u>BELANJA DAERAH</u>		
Belanja Tidak Langsung	1 668 156 981 442	1 831 872 717 522
Belanja Langsung	1 445 156 683 685	1 651 799 638 009
Jumlah Belanja Daerah	3 113 313 665 127	3 483 672 355 531
<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>		
Penerimaan Pembiayaan	276 750 267 366	240 276 961 487
Pengeluaran Pembiayaan	71 000 000 000	53 919 543 332
<u>Pembiayaan Netto</u>	205 750 267 366	186 357 418 155

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
*) Angka sementara

Sama halnya dengan keadaan langsung lebih besar dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2014 belanja langsung. Pada tahun tersebut pengeluaran untuk belanja tidak realisasi belanja tidak langsung adalah

1,83 triliun rupiah, sedangkan belanja langsung sebesar 1,65 triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2013 realisasi belanja tidak langsung tercatat sebesar 1,67 triliun rupiah, dan belanja langsung dengan nilai 1,44 triliun rupiah.

5.2. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Secara total APBD dari pos penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah 15,57 triliun rupiah. Sumber penerimaan terbesar berasal dari dana perimbangan, yaitu sebesar 12,37 triliun rupiah atau mencapai 79,45 persen dari total APBD. Sementara itu penerimaan yang berasal dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah masing-masingnya berjumlah 1,12 triliun rupiah dan 2,08 triliun rupiah.

Sebagai ibukota provinsi dan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Sumatera Barat, kota Padang mempunyai penerimaan APBD yang paling besar. Di tahun 2014 pendapatan APBD kota Padang

diperkirakan mencapai 1,91 triliun rupiah. Sebagaimana halnya dengan total penerimaan pada kabupaten/kota se Sumatera Barat, sumber penerimaan terbesar kota Padang juga berasal dari dana perimbangan yang tercatat sebanyak 1,20 triliun rupiah. Sedangkan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah terdapat dalam jumlah yang lebih kecil, yaitu masing-masingnya 315,06 milyar rupiah dan 395,92 milyar rupiah.

Dibanding dengan Padang, daerah kota yang lainnya di Sumatera Barat mempunyai penerimaan APBD yang jauh lebih kecil, bahkan tidak mencapai setengahnya. Namun keenam daerah kota tersebut memiliki range APBD yang tidak terlalu jauh antara satu dengan lainnya. Setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi menempati urutan kedua dalam hal jumlah penerimaan pendapatan. Pada tahun 2014 APBD Bukittinggi adalah sebesar 596,72 milyar rupiah sedangkan yang paling kecil adalah APBD Kota Padang Panjang sebesar 455,31 milyar rupiah.

Tabel 5.2.1
Ringkasan APBD Kabupaten/Kota Menurut Sumber Penerimaan Tahun 2014
(rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain pendapatan yang syah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Kabupaten				
1. Kep. Mentawai	39 438 332 000	650 297 365 000	30 230 332 000	9 966 029 000
2. Pesisir Selatan	50 012 298 671	886 023 772 456	227 260 449 000	1 163 296 520 127
3. Solok	33 757 230 087	758 505 325 762	132 164 171 019	924 426 726 868
4. Sijunjung	44 136 758 000	595 586 530 000	77 301 116 000	717 024 404 000
5. Tanah Datar	62 198 189 000	725 921 677 000	29 175 690 000	817 295 556 000
6. Padang Pariaman	38 645 707 000	809 705 362 000	204 259 987 000	1 052 611 056 000
7. Agam	60 156 322 000	832 693 230 897	181 748 241 000	1 074 597 793 897
8. 50 Kota	45 861 390 000	784 979 326 000	142 311 101 000	973 151 817 000
9. Pasaman	40 303 016 300	609 038 568 650	22 338 787 150	671 680 372 100
10. Solok Selatan	39 493 846 771	507 640 426 782	70 105 801 000	617 240 074 553
11. Dharmasraya	56 894 095 948	548 237 899 164	99 705 706 400	704 837 701 512
12. Pasaman Barat	51 054 255 501	980 788 793 475	92 159 855 629	1 124 002 904 605
B. Kota				
71. Padang	315 065 010 119	1 203 006 164 906	395 919 428 000	1 913 990 603 025
72. Solok	25 370 393 456	397 130 500 711	46 676 049 876	469 176 944 043
73. Sawahlunto	43 762 002 000	385 806 959 908	43 367 679 000	472 936 640 908
74. Padang Panjang	39 156 750 000	378 613 768 000	37 543 378 000	455 313 896 000
75. Bukittinggi	57 854 355 950	416 946 126 874	121 919 866 000	596 720 348 824
76. Payakumbuh	60 965 911 396	459 342 842 982	66 727 192 480	387 035 946 858
77. Pariaman	18 853 798 806	438 661 538 289	56 308 234 112	513 823 571 207
Jumlah	1 122 979 663 005	12 368 926 178 856	2 077 223 064 666	15 569 128 906 527

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Semua APBD daerah kabupaten lebih tinggi dibanding daerah kota (selain Kota Padang). APBD paling besar di daerah kabupaten dari sisi penerimaan adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dengan nilai sebesar 1,16 triliun rupiah. Selanjutnya yang paling rendah adalah APBD di Kabupaten Solok Selatan dengan nilai 617,24 milyar rupiah. Untuk semua daerah kabupaten/Kota, pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana perimbangan.

Daerah yang memiliki PAD terbesar di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang adalah Kabupaten Tanah Datar dan Kota Payakumbuh dengan nilai PAD-nya masing-masing sebesar 62,20 milyar rupiah dan 60,96 milyar rupiah. Sedangkan daerah yang memiliki PAD paling rendah adalah Kota Pariaman dengan nilai 18,85 milyar rupiah.

Secara keseluruhan realisasi belanja daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2014 lebih rendah dibanding pendapatan pemerintah daerah. Di tahun tersebut pendapatan daerah seluruh

kabupaten/kota berjumlah 15,94 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sebesar 15,17 triliun rupiah.

Realisasi APBD kota Padang tahun 2014 merupakan yang paling besar bila dilihat baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah dibanding daerah kabupaten/ kota lainnya. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 1,91 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah kota Padang tercatat sebesar 1,79 triliun rupiah.

Selain kota Padang, secara umum pendapatan dan belanja daerah kabupaten jumlahnya lebih tinggi dibanding daerah kota. Kabupaten-kabupaten yang memiliki realisasi pendapatan dan belanja daerah yang termasuk tinggi antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Tanah datar, Padang Pariaman, Agam dan Lima Puluh Kota. Kelima kabupaten tersebut memiliki realisasi pendapatan di atas 1 triliun rupiah. Demikian juga dengan belanja daerah kelima kabupaten tersebut juga berada pada kisaran satu triliun rupiah. Sementara itu kabupaten yang memiliki realisasi pendapatan paling rendah adalah

kabupaten Solok Selatan dengan angka sebesar 630,48 milyar rupiah, sedangkan kabupaten yang memiliki belanja daerah yang paling rendah juga Kabupaten Solok Selatan sebesar 579,08 milyar rupiah.

Realisasi pendapatan daerah kota selain Padang berada pada kisaran yang hampir sama. Realisasi paling besar ditemukan pada kota Payakumbuh dengan nilai sebesar 602,64 milyar rupiah dan yang paling

rendah terdapat di kota Padang Panjang sebesar 475,21 milyar rupiah.

Realisasi belanja daerah kota selain kota Padang juga tidak memiliki rentang yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Belanja daerah terbesar terdapat pada kota Payakumbuh dengan nilai sebesar 593,64 milyar rupiah, sedangkan terendah terdapat pada kota Padang Panjang sebesar 406,62 milyar rupiah.

<http://sumbar.bps.go.id>

Tabel 5.2.2
Realisasi Pendapatan/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat, 2014 (Rp.) *)

Kabupaten/Kota	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah		
			Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Kabupaten					
1. Kep. Mentawai	693 476 259 572	685 481 436 346	214 298 810 764	18 000 000 000	204 293 633 990
2. Pesisir Selatan	1 174 832 132 802	1 143 236 082 548	107 643 993 118	9 826 000 000	1 029 424 043 373
3. Solok	988 386 642 245	948 897 476 607	69 780 439 295	69 780 439 295	101 899 604 933
4. Sijunjung	748 241 681 501	685 373 396 404	75 004 757 156	75 004 757 156	101 621 088 688
5. Tanah Datar	10 047 201 401 669	971 007 739 987	101 643 461 408	101 643 461 408	119 355 861 587
5. Pdg Pariaman	1 069 892 847 387	1 045 840 086 570	68 968 550 039	68 968 550 039	85 407 310 856
7. Agam	1 131 606 172 917	1 095 779 288 829	79 239 430 745	79 239 430 745	108 925 314 834
8. 50 Kota	1 004 220 871 877	986 352 862 831	65 194 039 565	65 194 039 565	80 682 048 611
9. Pasaman	813 389 913 599	767 462 637 969	99 030 998 839	99 030 998 839	130 779 274 469
10. Solok Selatan	630 477 448 563	579 082 893 529	20 376 944 932	-	71 771 499 966
11. Dharmasraya	682 218 600 460	677 205 640 957	28 493 218 148	-	33 506 177 651
12. Pasaman Barat	880 800 350 711	834 977 439 117	84 683 855 528	84 683 855 528	127 506 767 122
B. Kota					
71. Padang	1 913 522 926 784	1 794 324 395 903	228 610 098 442	19 021 000 000	328 787 629 324
72. Solok	485 576 817 521	433 104 463 369	73 020 981 641	13 448 673 562	112 044 662 232
73. Sawahlunto	488 405 317 004	472 392 963 811	66 887 793 261	9 593 000 000	73 307 146 455
74. Padang Panjang	475 208 494 830	406 617 041 960	81 402 082 736	-	149 993 535 606
75. Bukittinggi	595 424 923 587	542 050 354 974	75 328 096 273	29 583 000 000	99 119 664 886
76. Payakumbuh	602 643 642 279	593 640 727 396	59 726 328 855	9 540 000 000	59 189 243 738
77. Pariaman	552 365 209 078	505 918 643 589	92 862 840 152	5 111 000 000	134 198 405 641
Jumlah *)	15 935 410 392 886	15 168 745 572 695	1 692 196 720 898	184 137 673 561	2 251 802 913 963
Prov. Sumbar	3 635 880 694 200	3 483 715 288 910	240 276 961 487	53 919 543 332	33 522 823 444
Seluruhnya/	19 571 291 087 086	18 652 460 861 606	1 932 473 682 385	238 057 216 893	2 285 325 737 407

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

*) Angka sementara



PERBANKAN

- ✧ **STRUKTUR PERBANKAN**
- ✧ **PENGHIMPUNAN DANA BANK**
- ✧ **POSISI KREDIT PERBANKAN**

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga pemeringkat kredit PT ICRA Indonesia menilai sektor perbankan di Tanah Air mengalami penurunan kinerja di tahun 2014. Pinjaman perbankan tumbuh sebesar 11,6 persen, jauh dibawah ekspektasi ICRA Indonesia dan merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun empat tahun terakhir. Perbankan Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang berat selama tahun 2014 seperti suku bunga yang tinggi, kelesuan dalam aktifitas bisnis dengan adanya dua kali pemilihan umum, inflasi yang meninggi, kenaikan tarif listrik dan upah minimum dan likuiditas yang ketat. Selain itu Negara Amerika Serikat menunjukan

perbaikan kontinu pada indikator-indikator ekonominya. Walaupun demikian, ICRA Indonesia melihat kinerja perbankan menurun pada tahun 2014 dari sudut pandang intermediasi keuangan, yang ditandai dengan pertumbuhan kredit yang secara signifikan lebih rendah dibanding ekspektasi.

Hasil riset Morgan Stanley menunjukkan bahwa peran perbankan Indonesia hanya sebesar 26 persen dari PDB nasional. Sementara itu perbankan Cina dan India bisa berperan hingga 60 persen dari PDB negaranya.

Ada beberapa hal yang jadi penyebab kurang lancarnya kredit perbankan. Salah satunya adalah belum pulihnya kondisi perekonomian di pasca krisis global 2008. Hal ini berakibat pada berkurangnya permintaan kredit. Di samping itu, sektor riil sendiri sebagai pihak debitur belum maksimal dalam menggunakan dana yang didapat dari perbankan. Hal ini diduga karena sektor riil menjaga dananya, dan tidak menggunakannya dengan optimal, sehingga belum membutuhkan dana tambahan dan mengajukan kredit ke bank. Penyebab lain minimnya pertumbuhan kredit

adalah tingkat suku bunga yang masih tinggi.

Krisis finansial global yang menyebabkan kurang lancarnya kredit perbankan terutama sekali dilakukan dengan jalan mengerem laju pertumbuhan kredit menengah dan korporasi, namun sebaliknya meningkatkan portofolio di segmen ritel dan mikro. Sektor UKM diyakini mampu bertahan terhadap krisis. Bank banyak yang agresif melakukan ekspansi di sektor mikro.

Sementara itu kondisi perbankan umum di Sumatera Barat masih menunjukkan perkembangan positif, meskipun secara umum perkembangan penyaluran kredit masih relatif terbatas dan juga mengalami perlambatan. Disisi lain perkembangan bank umum syariah menunjukkan perkembangan yang terus menggeliat. Walau asetnya masih kecil, bank syariah secara nasional menunjukkan pertumbuhan pesat yaitu lebih dari 30 persen. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan keuangan syariah global.

6.1. Struktur Perbankan

Berdasarkan kegiatan usaha, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah yang masing-masing dirinci lagi menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut jenisnya bank umum konvensional dibedakan menjadi bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri saja. Dari segi kepemilikannya, bank umum terdiri dari bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank umum swasta nasional dan bank asing/campuran.

Pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin luas dengan bertambahnya jumlah kantor bank yang ada. Ini merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 6.1.1
Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sumatera Barat, 2012-2014

Jenis Bank	2012		2013		2014	
	Bank	Kantor Bank	Bank	Kantor Bank	Bank	Kantor Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Bank Konvensional	119	650	117	668	117	668
1. Bank Umum	21	401	21	419	21	419
1.1. Bank Umum Devisa	17	364	16	381	16	381
1. Bank Pemerintah	3	208	3	219	3	219
2. BPD	1	93	1	94	1	94
3. Bank Swasta Nasional	12	62	11	67	11	67
4. Bank Asing & Campuran	1	1	1	1	1	1
1.2. Bank Umum Non Devisa	4	37	5	38	5	38
1. Bank Pemerintah	1	7	1	7	1	7
2. BPD	-	-	-	-	-	-
3. Bank Swasta Nasional	3	30	4	31	4	31
4. Bank Asing & Campuran	-	-	-	-	-	-
2. Bank Perkreditan Rakyat	98	249	96	249	96	249
BPR	98	249	96	249	96	249
II. Bank Syariah	16	84	18	95	18	95
1. Bank Umum	7	47	6	55	6	55
2. Bank Umum Unit Usaha Syariah	2	7	5	10	5	10
3. Bank Perkreditan Rakyat	7	30	7	30	7	30
Jumlah	135	734	135	763	135	763

Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII

Jumlah bank pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat sama dengan kondisi dua tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 135 bank. Sedangkan

jumlah kantor bank tidak berubah sejak tahun 2013, yaitu sebanyak 763 kantor bank. Kantor bank disini mencakup kantor pusat, kantor

wilayah, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu.

Secara total jumlah bank di Sumatera Barat pada tahun 2014 sama dengan tahun sebelumnya, demikian juga dengan jumlah kantor bank menurut jenisnya juga persis sama. Kondisi ini berbeda dengan keadaan tahun 2013 dengan jumlah bank yang sama dengan tahun 2012 namun jumlah kantor bank bertambah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 tersebut pada bank konvensional terjadi pengurangan 2 bank. Perubahan jumlah ini terjadi pada BPR yang berkurang 2 bank, yakni dari 98 bank menjadi 96 bank. Pada bank umum konvensional terjadi keseimbangan, yaitu bank umum devisa berkurang jumlahnya dari 17 menjadi 16 bank atau berkurang 1 bank, sedangkan bank umum non devisa bertambah dari 4 bank menjadi 5 bank atau bertambah sebanyak 1 bank. Perubahan jumlah bank umum konvensional, meningkat atau berkurang sama-sama terjadi pada bank swasta nasional. Pada bank umum devisa berkurang 1 bank, dari 12 menjadi 11 bank, sedangkan pada

bank umum non devisa bertambah satu bank dari 3 bank menjadi 4 bank.

Selanjutnya pada tahun 2013 ini peningkatan jumlah kantor bank di Sumatera Barat terjadi pada kedua jenis bank, yaitu pada bank konvensional dan bank syariah. Peningkatan kedua jenis kantor bank ini terdapat dalam jumlah yang cukup banyak. Pada kantor bank konvensional terjadi peningkatan dari 650 kantor bank di tahun 2012 menjadi 668 kantor bank di tahun 2013. Pada bank syariah terjadi penambahan kantor bank dari 84 kantor di tahun 2012 menjadi 95 kantor bank di tahun 2013. Bila dirinci lebih lanjut peningkatan pada kantor bank konvensional umum terjadi pada kedua jenis bank, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Pada bank umum devisa kantor bank meningkat dari 364 menjadi 381 kantor bank, sedangkan pada bank umum non devisa terjadi peningkatan sebanyak satu kantor bank, yaitu dari 37 kantor di tahun 2012 menjadi 38 kantor bank di tahun 2013. Secara total jumlah kantor bank umum konvensional bertambah dari 401

kantor menjadi 419 kantor bank di tahun 2013. Sedangkan kantor bank BPR sejak tahun 2012 sampai 2014 masih tetap berjumlah 249 kantor.

Selanjutnya di tahun 2013 juga terjadi peningkatan jumlah kantor bank syariah yaitu dari 84 kantor bank di tahun 2012 menjadi 95 kantor bank. Bila dirinci lebih detil, peningkatan bank syariah terjadi pada bank umum syariah yang meningkat dari 47 kantor di tahun 2012 menjadi 55 kantor bank di tahun 2013. Peningkatan berikutnya terjadi pada bank umum unit usaha syariah yang bertambah dari 7 kantor di tahun 2012 menjadi 10 kantor di tahun 2013. Pada bank BPR syariah sejak tahun 2012 tidak mengalami perubahan jumlah kantor bank, yaitu masih tetap memiliki 30 kantor.

Yang dimaksud dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang

dimiliki dengan layanan yang terbatas pula.

Perkembangan yang mengembirakan pada bank syariah ini juga terdapat pada jumlah kantor bank yang menunjukkan peningkatan di tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah kantor bank syariah adalah sebanyak 84 kantor, tahun 2013 meningkat menjadi 95 kantor, dan jumlah ini tidak mengalami perubahan sampai dengan keadaan tahun 2014. Peningkatan jumlah kantor ini terjadi pada dua jenis bank syariah, yaitu pada bank umum syariah terdapat peningkatan kantor bank dari berjumlah 47 di tahun 2012 menjadi 55 kantor bank atau bertambah 8 kantor pada tahun 2013. Pada bank umum unit usaha syariah tahun 2012 terdapat 7 kantor sedangkan tahun 2013 menjadi 10 kantor bank. Selanjutnya jumlah kantor bank pada BPR syariah tidak mengalami penambahan sejak tahun 2012 dan masih tetap berjumlah 30 kantor bank di tahun 2014.

Bank syariah atau bank islam adalah bank yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Alquran, As Sunnah,

dan lain-lain). Secara operasional bank syariah dijabarkan sebagai bank yang beroperasi dengan tidak berlandaskan bunga. Kondisi ini tentu membuka peluang untuk berkembangnya bank syariah di Sumatera Barat yang merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

6.2 Penghimpunan Dana Bank

Jenis Simpanan yang terdapat pada Bank Umum ada tiga macam, yaitu berupa giro, simpanan berjangka dan tabungan. Sedangkan pada BPR mencakup simpanan berjangka dan tabungan. Penghimpunan dana oleh bank dari masyarakat atau pihak ketiga terdapat dalam dua bentuk, yaitu berbentuk rupiah dan valuta asing (valas).

Sampai keadaan tahun 2014 perbankan di Sumatera Barat selalu masih mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013 tercatat 26,85 triliun rupiah dana masyarakat dihimpun bank, baik dalam bentuk Rupiah ataupun Valuta Asing, Selanjutnya pada tahun 2014 bank berhasil

menghimpun dana masyarakat sebanyak 30,47 triliun rupiah, yang berarti terjadi peningkatan penghimpunan dana masyarakat sebesar 13,50 persen. Peningkatan pada tahun 2014 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 3,80 persen, karena dana yang dihimpun bank pada tahun 2012 adalah 25,79 triliun rupiah.

Tabel 6.2.1

**Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Dan BPR
di Sumatera Barat, 2012-2014 (juta rupiah)**

Jenis Bank/Jenis Simpanan	2012	2013**)	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Rupiah</u>	25 204 844	26 162 278	29 552 540
Bank Pemerintah *)	18 618 694	19 528 911	22 432 465
Bank Swasta nasional	5 618 960	5 720 449	6 387 871
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	967 191	912 918	732 205
<u>Valuta Asing</u>	587 437	684 667	918 889
Bank Pemerintah *)	274 623	341 568	572 287
Bank Swasta nasional	312 814	343 099	346 602
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	-	-	-
<u>Rupiah Valuta Asing</u>	25 792 282	26 846 945	30 471 429
Bank Pemerintah *)	18 893 318	19 870 479	23 004 752
Bank Swasta nasional	5 931 774	6 063 549	6 734 473
Bank Asing dan Bank Campuran	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	967 191	912 918	732 205

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia

Keterangan : *) Mencakup Bank Pemerintah Daerah

***) Data diperbaiki

Simpanan masyarakat Sumatera Barat di bank dalam bentuk rupiah masih lebih dominan dibanding bentuk valuta asing. Pada tahun 2014 simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah mencapai 29,55 triliun rupiah atau 96,98 persen dari total simpanan. Selanjutnya penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk rupiah lebih

banyak terdapat pada bank pemerintah, diikuti oleh bank swasta nasional dan BPR. Pada tahun 2014 bank pemerintah mengumpulkan dana masyarakat sebesar 22,43 triliun rupiah atau 75,91 persen dari total dana masyarakat dalam bentuk rupiah, sedangkan bank swasta nasional dan BPR masing-masingnya sebesar 6,39

triliun rupiah dan 732,20 milyar rupiah. Penghimpunan dana pada bank pemerintah dan bank swasta nasional meningkat bila dibanding tahun 2013 yang tercatat masing-masing sebesar 19,53 triliun rupiah dan 5,72 triliun rupiah, sedangkan pada BPR mengalami penurunan dengan jumlah 912,92 milyar rupiah.

Secara total penghimpunan dana masyarakat oleh bank dalam bentuk valuta asing di tahun 2014 berjumlah 918,89 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2013 ataupun tahun 2012. Pada tahun 2012 tercatat 587,44 milyar rupiah simpanan masyarakat dalam bentuk valuta asing, sedangkan di tahun 2013 terkumpul sebanyak 684,67 milyar rupiah.

Penghimpunan dana dalam bentuk valuta asing ini dilakukan oleh dua kelompok bank, yaitu bank pemerintah dan bank swasta nasional, sedangkan pada bank asing dan bank campuran serta bank BPR tidak ada pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk valuta asing.

Berbeda dengan keadaan tahun 2012 dan 2013 dengan penghimpunan dalam bentuk valuta asing pada bank swasta nasional sedikit lebih besar dibanding pada bank pemerintah, pada tahun 2014 terjadi sebaliknya. Pada tahun 2014 bank pemerintah dan bank swasta nasional masing-masingnya menghimpun dana sebesar 572,29 milyar rupiah dan 346,60 milyar rupiah. Sementara itu pada tahun 2013 bank pemerintah dan bank swasta nasional menghimpun dana masyarakat masing-masingnya sebesar 341,57 milyar rupiah dan 343,10 milyar rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 tercatat masing-masingnya sebanyak 274,62 milyar rupiah dan 312,81 milyar rupiah.

6.3 Posisi Kredit Perbankan

6.3.1 Posisi Kredit Menurut Jenis Penggunaan

Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh pihak perbankan di Sumatera Barat juga diiringi oleh peningkatan pemberian kredit. Secara total pinjaman yang diberikan perbankan dalam bentuk rupiah dan valuta asing di tahun 2014 meningkat jumlahnya dibanding tahun-tahun

sebelumnya. Selama periode 2012-2014 terlihat *trend* yang meningkat dalam pemberian pinjaman, pada tahun 2012 baru mencapai 35,04 triliun rupiah, pada tahun 2013 meningkat menjadi 39,47 triliun rupiah, dan selanjutnya pada tahun 2014 mencapai 43,90 triliun rupiah.

Bila dilihat menurut jenis pinjaman yang diberikan oleh bank, kredit yang paling banyak dimanfaatkan tergolong pada penggunaan untuk konsumsi. Tercatat pada tahun 2014 sebesar 19,40 triliun rupiah merupakan pinjaman untuk konsumsi. Pada urutan berikutnya adalah untuk modal kerja sebesar 16,73 triliun rupiah. Penggunaan untuk investasi merupakan jenis penggunaan yang paling sedikit, yaitu senilai 7,78 triliun rupiah. Ketiga jenis penggunaan pinjaman yang disalurkan bank ini juga memiliki *trend* meningkat selama periode 2012-2014.

Peningkatan jumlah pinjaman yang disalurkan bank bila dilihat berdasarkan bentuk pinjaman juga mengalami peningkatan yang terjadi baik pada kredit rupiah maupun kredit valuta asing. Jumlah pinjaman dalam

bentuk rupiah meningkat mulai dari 33,76 triliun rupiah di tahun 2012 menjadi 42,24 triliun rupiah di tahun 2014. Demikian juga pinjaman dalam bentuk valuta asing meningkat dari 1,28 triliun rupiah di tahun 2012 menjadi 1,66 triliun rupiah di tahun 2014. Selanjutnya pinjaman dalam bentuk rupiah lebih banyak digunakan untuk konsumsi, berbeda dengan pinjaman valuta asing yang lebih banyak digunakan untuk investasi.

Seperti halnya pada penghimpunan dana masyarakat, pinjaman yang diberikan oleh bank dalam bentuk rupiah merupakan bentuk yang lebih besar dibanding yang berbentuk valuta asing. Pada tahun 2014 pinjaman yang diberikan bank yang berbentuk rupiah adalah sebesar 42,24 triliun rupiah, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 38,10 triliun rupiah. Peningkatan pinjaman ini terjadi pada ke tiga jenis penggunaan. Pada tahun 2014 pinjaman untuk konsumsi mencapai angka 19,38 triliun rupiah. Sedangkan yang paling kecil digunakan untuk investasi yang di tahun 2014 tercatat sebesar 6,76 triliun

rupiah, sedangkan pinjaman untuk modal kerja tercatat sebesar 16,10 triliun rupiah.

Pinjaman yang diberikan perbankan yang berbentuk valuta asing di tahun 2012-2014 menunjukkan kondisi yang sama dengan pinjaman berbentuk rupiah. Pada tahun 2012 pinjaman berbentuk valuta asing tercatat sebesar 1,28 triliun rupiah, di tahun 2013 meningkat menjadi 1,38 triliun rupiah, dan di tahun 2014 masih terus meningkat menjadi 1,66 triliun rupiah.

Peningkatan pemberian kredit dalam bentuk valuta asing selama tahun 2014 terjadi pada semua penggunaan. Pemberian kredit yang digunakan untuk investasi merupakan

yang terbesar dibanding yang lainnya. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 1,02 triliun rupiah pinjaman untuk investasi dalam bentuk valuta asing, meningkat dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 969,34 milyar rupiah. Sementara itu pada tahun 2013 pinjaman valuta asing untuk modal kerja adalah sebesar 406,66 milyar rupiah, pada tahun 2014 meningkat menjadi 632,19 milyar rupiah. Selanjutnya pinjaman valuta asing untuk konsumsi yang pada tahun 2012 terdapat sebesar 114 juta rupiah, pada tahun 2013 malahan tidak ada sama sekali, dan pada tahun 2014 kembali terdapat 13,53 milyar rupiah.

Tabel 6.3.1
Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan
di Sumatera Barat 2012-2014 (juta rupiah)

Rincian	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah	33 764 779	38 096 509	42 241 064
1. Modal Kerja	13 035 463	14 480 996	16 095 073
2. Investasi	4 688 213	6 215 451	6 763 841
3. Konsumsi	16 041 102	17 400 062	19 382 150
Valuta Asing	1 279 299	1 376 003	1 663 692
1. Modal Kerja	559 350	406 663	632 187
2. Investasi	719 835	969 340	1 017 974
3. Konsumsi	114	-	13 531
Jumlah	35 044 078	39 472 513	43 904 756
1. Modal Kerja	13 594 813	14 887 659	16 727 260
2. Investasi	5 408 049	7 184 791	7 781 815
3. Konsumsi	16 041 216	17 400 062	19 395 681

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia

Sementara itu kredit yang khusus diberikan oleh bank kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selama ini secara kuantitas masih jauh lebih kecil dibanding pinjaman untuk yang bukan UMKM. Sedangkan penggunaan kredit untuk UMKM ini juga dikelompokkan atas tiga, yaitu yang penggunaannya untuk modal kerja, investasi, dan yang tidak teridentifikasi.

Pada tahun 2014 tercatat sebesar 13,24 triliun rupiah kredit

yang telah disalurkan oleh pihak perbankan Sumatera Barat kepada UMKM. Kondisi tahun tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 11,80 triliun rupiah. Pinjaman untuk UMKM ini penggunaannya hanya untuk dua jenis, yaitu untuk modal kerja dan investasi. Penggunaan terbesar di tahun 2014 tersebut dari kredit yang diberikan bank di Sumatera Barat adalah untuk modal kerja (10,40 triliun rupiah), yang

diikuti oleh untuk investasi sebesar 2,83 triliun rupiah.

Kredit Untuk UMKM yang diberikan perbankan di Sumatera Barat sebagian besar disalurkan melalui bank pemerintah. Pada tahun 2014 sebanyak 10,15 triliun rupiah kredit dikucurkan untuk UMKM atau ini sekitar 76,65 persen dari total kredit UMKM. Dan sebagian besar kredit dari bank pemerintah itu digunakan untuk investasi yang mencapai 8,46 triliun rupiah, sisanya adalah untuk investasi sebesar 1,69 triliun rupiah.

Bank swasta nasional di Sumatera Barat memberikan kredit kepada UMKM dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding bank pemerintah, dengan jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Kredit bank swasta kepada UMKM di tahun 2013 adalah 2,48 triliun rupiah, sementara itu pada tahun 2012 sebesar 2,23 triliun rupiah kredit telah disalurkan oleh bank swasta nasional. Pada tahun 2014 tercatat kredit untuk

UMKM sedikit berkurang dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2,45 triliun rupiah. Sama halnya dengan penyaluran kredit oleh bank pemerintah, pada bank swasta nasional penggunaan kredit UMKM terbanyak juga untuk modal kerja. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 1,58 triliun rupiah kredit UMKM untuk modal kerja dikucurkan bank swasta nasional, sedangkan untuk investasi adalah sebesar 873,68 milyar rupiah.

Bank asing dan bank campuran menyalurkan kredit perbankan kepada usaha kecil, mikro dan menengah dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibanding kelompok bank pemerintah dan bank swasta nasional. Pada tahun 2014 bank asing dan bank campuran telah menyalurkan kredit sebesar 638,94 milyar rupiah, yang terbagi atas kredit untuk modal kerja sebesar 367,23 milyar rupiah dan untuk investasi sebanyak 271,71 milyar rupiah.

Tabel 6.3.2
Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Diberikan menurut
Kelompok Bank dan Jenis Penggunaan di Sumatera Barat 2012-2014
(juta rupiah)

Rincian	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Bank Pemerintah	8 422 483	9 318 550	10 146 696
1. Modal Kerja	7 384 375	7 694 863	8 459 256
2. Investasi	1 058 107	1 623 687	1 687 439
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
II. Bank Swasta Nasional	2 234 536	2 479 250	2 452 002
1. Modal Kerja	1 486 410	1 616 552	1 578 317
2. Investasi	748 126	862 698	873 685
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
III. Bank Asing dan Bank Campuran	5 592	6 293	638 936
1. Modal Kerja	2 914	4 442	367 229
2. Investasi	2 678	1 851	271 706
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-
Jumlah	10 662 611	11 804 093	13 237 634
1. Modal Kerja	8 853 699	9 315 857	10 404 803
2. Investasi	1 808 911	2 488 236	2 832 831
3. Tidak Teridentifikasi	-	-	-

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumatera Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan VIII

6.3.2. Posisi Kredit Menurut Sektor Ekonomi

Sektor perdagangan merupakan sektor yang mendapat alokasi kredit terbesar yang diberikan perbankan di Sumatera Barat. Sektor perdagangan yang menyerap tenaga

kerja sebanyak 18,15 persen dan memberikan sumbangan PDRB sebesar 14,29 persen, ternyata bisa mendapatkan kredit perbankan lebih besar dibanding sektor lain. Pada tahun 2014 kredit yang berupa rupiah dan valuta asing yang diperoleh sektor perdagangan ini adalah sebesar 12,16

triliun rupiah. Sementara itu pada tahun 2013 kredit yang diterima pada sektor perdagangan adalah sebesar 10,90 triliun rupiah.

Sektor ekonomi lainnya yang menyerap kredit perbankan dalam jumlah yang juga relatif besar adalah sektor pertanian, peternakan,

kehutanan dan perikanan. Sebagai sektor tempat bergantung 30,51 persen penduduk Sumatera Barat, sektor pertanian pada tahun 2014 berhasil mendapat kredit perbankan sebesar 4,10 triliun rupiah. Nilai kredit ini meningkat dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 3,98 triliun rupiah.

Tabel 6.3.3
Posisi Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Menurut Lapangan Usaha di Sumatera Barat, 2013-2014 (juta rupiah)

Sektor Ekonomi	Rupiah dan Valas		Rupiah	
	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	22 072 451	24 509 076	20 696 448	22 748 481
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3 982 138	4 095 533	3 565 903	3 694 993
Pertambangan dan Penggalian	488 778	468 666	408 496	373 967
Industri Pengolahan	3 060 833	3 798 006	2 185 606	2 613 725
Listrik, Gas & Air Bersih	46 404	32 086	46 404	31 546
Konstruksi	509 540	891 539	509 540	888 065
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10 896 092	12 158 504	10 891 832	12 099 154
Pengangkutan dan Komunikasi	670 378	583 368	670 378	578 621
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	786 464	1 047 307	786 464	1 046 527
Jasa-Jasa	1 631 825	1 434 067	1 631 825	1 421 883
Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	17,400,062	19 395 681	17 400 062	19 357 046
Rumah Tinggal	2 212 850	2 410 699	2 212 850	2 410 699
Flat dan Apartemen	27 724	79 601	27 724	76 601
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	190,610	240 532	190 610	240 532
Kendaraan Bermotor	1 694 639	2 238 378	1 694 639	2 238 378
Lainnya	13 274 238	14 426 471	13 274 238	14 387 837
Jumlah	39 472 513	43 904 756	38 096 509	42 105 527

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia

Sementara itu sektor yang paling kecil menyerap kredit perbankan di Sumatera Barat adalah sektor listrik, gas dan air, baik pada tahun 2013 ataupun pada tahun 2014. Berturut-turut nilai kredit yang diterima sektor tersebut pada kedua tahun tersebut adalah 46,40 milyar rupiah dan 32,09 milyar rupiah.

Pinjaman kepada bukan lapangan usaha yang diberikan pihak bank paling banyak ternyata digunakan untuk kredit rumah tinggal, diikuti oleh kredit untuk kendaraan bermotor. Pinjaman yang diberikan untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2014 dibanding dengan tahun 2013. Pada tahun 2013 kredit rumah tinggal tercatat sebesar 2,21 triliun rupiah, dan pada tahun 2014 menjadi 2,41 triliun rupiah. Kredit untuk kendaraan bermotor pada tahun 2013 adalah sebesar 1,69 triliun rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 2,24 triliun rupiah.

Untuk kredit yang telah diberikan selama ini oleh bank-bank di Sumatera Barat untuk usaha mikro,

kecil, dan menengah ternyata juga yang utama adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Dari total kredit yang diterima usaha mikro, kecil, dan menengah di tahun 2014 yang tercatat sebesar 13,24 triliun rupiah, ternyata sebanyak 8,22 triliun rupiah atau 62,24 persen dari total kredit berhasil diserap oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran tersebut.

Dalam hal penyerapan kredit usaha mikro, kecil dan menengah, terdapat kondisi yang belum menggembirakan pada sektor pertanian. Sektor yang merupakan tumpuan sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat ternyata belum banyak bisa menyerap kredit dari perbankan. Pada tahun 2014 usaha mikro, kecil, dan menengah sektor pertanian hanya menerima kredit dari bank sebesar 1,78 triliun rupiah. Ini berarti kredit sektor pertanian untuk usaha yang tergolong mikro, kecil dan menengah hanya 13,44 persen dari kredit yang diterima usaha mikro, kecil dan menengah secara keseluruhan. Namun dibanding tahun 2013 kredit yang

diberikan pada sektor pertanian tersebut sudah mengalami peningkatan, pada tahun tersebut tercatat 1,54 triliun rupiah yang

disalurkan untuk UMKM sektor pertanian atau sekitar 13,05 persen dari keseluruhan kredit UMKM.

Tabel 6.3.4
Posisi Pinjaman Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi di Sumatera Barat, 2012-2014 (juta rupiah)

Sektor	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1 405 470	1 537 259	1 781 700
Pertambangan dan Penggalian	186 109	257 995	81 723
Industri Pengolahan	398 588	494 549	1 117 589
Listrik, Gas & Air Bersih	10 428	9 882	13 586
Konstruksi	319 828	361 673	352 479
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6 346 464	7 668 101	8 218 230
Pengangkutan dan Komunikasi	319 822	282 182	307 557
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	899 579	833 211	775 909
Jasa-Jasa	776 322	359 242	588 861
Tidak Teridentifikasi	-	-	-
Jumlah	10 662 611	11 804 093	13 237 634

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Barat, Bank Indonesia



PENDUDUK

- ✧ **PENDUDUK MENURUT JENIS
KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR**
- ✧ **PENDIDIKAN**
- ✧ **KETENAGAKERJAAN**
- ✧ **PENDUDUK BEKERJA MENURUT
LAPANGAN USAHA UTAMA**
- ✧ **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Kependudukan merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Data kependudukan dengan berbagai karakteristiknya sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah perencanaan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, lapangan kerja, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, tempat rekreasi dan lain-lain.

Jumlah penduduk pada suatu wilayah selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk suatu daerah atau negara dapat diketahui melalui sensus, registrasi dan survei penduduk.

Pertambahan penduduk secara tidak langsung akan menimbulkan efek, baik efek positif maupun negatif. Dari sisi negatif, bertambahnya penduduk akan menghambat pembangunan karena semakin besar jumlah penduduk, maka pendapatan perkapita masyarakat suatu daerah akan semakin kecil dan juga menambah masalah sosial ketenagakerjaan (masalah perumahan, kriminalitas, lapangan pekerjaan dan lain-lain). Dari sisi positif, bertambahnya penduduk akan memacu pembangunan karena kegiatan produksi akan terus berlangsung berkat adanya orang yang membeli dan mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Konsumsi dari barang-barang tersebut yang nantinya akan memacu kegiatan ekonomi dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung.

Tidak semua penduduk dapat berperan sebagai pemacu pembangunan. Dalam membangun suatu daerah diperlukan sumber daya manusia yang andal atau mempunyai kemampuan/*skill* yang tinggi. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kemampuan yang

memadai hanya akan menambah permasalahan ketenagakerjaan.

Setiap tahunnya jumlah penduduk Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Walaupun setiap tahun penduduk bertambah, namun laju pertumbuhan jumlah penduduk memperlihatkan keadaan yang berfluktuasi. Pada awal periode 2010-2014 berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010) didapatkan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk sudah mencapai 4.865.331 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,28 persen. Pertumbuhan penduduk di tahun 2010 ini merupakan pertumbuhan penduduk terendah pada periode tahun 2010-2014. Selanjutnya pada tahun 2011 penduduk Sumatera Barat mencapai 4.933.112 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,39 persen dan ini merupakan laju pertumbuhan terbesar pada periode tersebut. Pada tahun 2012 penduduk Sumatera Barat sudah tercatat sebanyak 5.000.184

jiwa dengan laju pertumbuhan 1,36 persen. Sedangkan pada tahun 2013 penduduk Sumatera Barat terdapat sebanyak 5.066.476 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,33 persen. Dan pada akhir periode atau pada tahun 2014, penduduk Sumatera Barat telah berjumlah 5.131.882 orang dan laju pertumbuhan adalah sebesar 1,29 persen.

Dibanding dengan keadaan pada awal periode data atau pada tahun 2010 telah terjadi penambahan penduduk sebanyak 266.551 jiwa atau selama lima tahun ini terjadi pertambahan penduduk sebanyak 5,48 persen atau rata-rata 1,10 persen per tahun. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 adalah sebesar 252,16 juta jiwa, atau merupakan yang keempat terbesar dunia. Sementara itu penduduk Sumatera Barat pada tahun tersebut merupakan 1,01 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Tabel 7.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2010–2014

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	4 865 331	1,28
2011	4 933 112	1,39
2012	5 000 184	1,36
2013	5 066 476	1,33
2014	5 131 882	1,29

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2014 (Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)

Selain karena adanya kelahiran dan kematian, perubahan penduduk Sumatera Barat akibat perpindahan penduduk keluar ataupun masuk wilayah Sumatera Barat cukup besar pengaruhnya dalam pertumbuhan penduduk. Hal ini akibat faktor kebiasaan masyarakat Minangkabau yang suka merantau. Selanjutnya juga dengan adanya beberapa sekolah/ perguruan tinggi yang diminati oleh masyarakat di luar Sumatera Barat akan mendorong bertambahnya penduduk di Sumatera Barat.

7.1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Menurut jenis kelamin, pada tahun 2014 di Sumatera Barat terdapat 2.515.942 jiwa penduduk laki-laki dan 2.550.534 jiwa penduduk perempuan. Dari keadaan ini terlihat penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki dan secara persentase pada tahun tersebut terdapat 49,66 persen penduduk laki-laki dan 50,34 persen penduduk perempuan atau ratio antara penduduk laki-laki dengan perempuan adalah sebesar 98,64.

Komposisi penduduk Sumatera Barat ditinjau menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3.241.284 jiwa atau 63,98 persen dari total penduduk merupakan penduduk berusia 15-64 tahun. Kelompok umur 15-64 tahun merupakan kelompok usia produktif, sehingga dengan besarnya kelompok umur ini berakibat pada besarnya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, pada besarnya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yang utama adalah perlunya kebutuhan pendidikan dan lapangan kerja yang besar.

Kebiasaan merantau yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau memberi dampak pada kelompok umur 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas di provinsi Sumatera Barat, yang menyebabkan penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Pada kelompok umur 15-64 tahun jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 1.611.062 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.630.222 jiwa.

Kondisi yang berbeda ditemui pada kelompok umur 0-14 tahun, penduduk laki-laki pada usia tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Secara umum diketahui bahwa di dunia memang kelahiran bayi laki-laki lebih besar dibanding bayi perempuan. Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 penduduk laki-laki pada kelompok umur 0-14 tahun tercatat sebanyak 790.982 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 759.911 jiwa. Secara total kelompok umur 0-14 tahun ini berjumlah 1.550.892 jiwa atau merupakan 30,61 persen dari keseluruhan penduduk Sumatera Barat.

Kelompok umur 65 tahun ke atas merupakan kelompok umur yang paling kecil jumlahnya dibanding kelompok umur lainnya. Pada tahun 2013 kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 274.299 jiwa. Namun dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan berjumlah 160.401 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 113.898 jiwa.

Tabel 7.1.1

Penduduk Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	796 608	31,23	765 307	29,65	1 561 915	30,44
15 – 64	1 636 788	64,18	1 654 776	64,10	3 291 564	64,14
65+	116 996	4,59	161 407	6,25	278 403	5,42
Jumlah	2 550 392	100,00	2 581 490	100,00	5 131 882	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

7.2. Pendidikan

Sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk Sumatera Barat masih belum terlalu baik. Hal ini dibuktikan dengan masih cukup besarnya persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah ataupun hanya memiliki ijazah pendidikan dasar, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah pendidikan tinggi jumlahnya masih jauh lebih kecil. Dewasa ini sampai dengan keadaan di tahun 2014 kondisi tersebut masih tetap sama.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mendapatkan bahwa pada tahun 2014 penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak

memiliki ijazah mencapai 26,75 persen. Sedangkan yang mempunyai ijazah setingkat Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah 23,64 persen. Untuk tingkat sekolah menengah, penduduk yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) lebih sedikit dibanding yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), masing-masingnya adalah 18,24 persen dan 23,88 persen. Dan penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II/III dan Diploma IV sampai S3 tercatat 2,32 persen dan 5,17 persen

Tabel 7.2.1

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2012– 2014 (%)

Ijazah yang Dimiliki	2012			2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tdk Punya	25,93	32,37	27,21	25,45	26,99	26,23	26,02	27,44	26,75
SD/MI	25,00	22,53	23,74	25,89	23,05	24,44	24,32	22,97	23,64
SMTP	19,55	18,56	19,05	19,02	18,62	18,82	19,11	17,40	18,24
SMTA	23,43	21,74	22,57	24,30	22,90	23,59	24,60	23,18	23,88
Dipl I/II/III	1,78	3,41	2,61	1,61	2,85	2,24	1,60	3,01	2,32
DIV sd S3	4,31	5,30	4,82	3,73	5,58	4,68	4,35	5,98	5,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Dewasa ini permasalahan gender masih merupakan masalah yang menjadi perhatian, baik di Indonesia khususnya maupun di dunia. Masih banyak anak tidak bisa bersekolah hanya karena berjenis kelamin perempuan. Namun di Sumatera Barat ternyata tidak demikian, karena tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara tingkat pendidikan penduduk laki-laki dengan perempuan. Perempuan di daerah ini diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menuntut

ilmu, bahkan ternyata melebihi dari kaum laki-laki. Seperti ditemui sampai tingkat pendidikan tinggi, pada tahun 2014 sebanyak 4,35 persen penduduk laki-laki mempunyai ijazah pendidikan pada tingkat DIV sampai dengan S3, sedangkan pada penduduk perempuan terdapat 5,98 persen pada tingkat pendidikan yang sama. Demikian juga untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III ternyata penduduk perempuan lebih banyak memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut dibanding

penduduk laki-laki, yaitu masing-masingnya sebesar 3,01 dan 1,60 persen.

7.3. Ketenagakerjaan

Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) mencatat bahwa pada tahun 2014 di Sumatera Barat terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 3.577,22 ribu orang. Penduduk usia 15 tahun ke atas ini dibedakan atas dua, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang memerlukan lapangan kerja. Tidak semua penduduk usia kerja tergolong ke dalam angkatan kerja. Ibu-ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa yang usianya 15 tahun ke atas tidak tergolong angkatan kerja. Dari Tabel 7.3.1 dan 7.3.2 diketahui bahwa jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja lebih banyak dibanding dengan yang bukan angkatan kerja.

Pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat penduduk yang termasuk pada angkatan kerja adalah sebanyak 2.331,99 ribu jiwa, atau

65,19 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Dibanding tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah angkatan kerja. Secara berturut-turut di tahun 2012 dan 2013 jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja sebanyak 2.179,82 ribu jiwa dan 2.156,38 ribu jiwa.

Jumlah penduduk laki-laki yang merupakan angkatan kerja lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2014 terdapat 1.410,08 ribu penduduk laki-laki atau merupakan 80,25 persen dari penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang termasuk pada angkatan kerja, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 921,91 ribu orang atau 50,65 persen dari penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas.

Bila dirinci lebih detil, angkatan kerja dikelompokan atas penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja di tahun 2014 tercatat sebanyak 2.180,34 ribu orang atau 60,95 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan jumlah penduduk yang termasuk pada kelompok pengangguran di Sumatera Barat

sebesar 151,66 ribu orang atau 4,24 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Dibanding tahun sebelumnya, angka pengangguran tersebut berkurang namun jumlahnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 banyaknya penduduk yang menganggur sebesar 150,76 ribu orang atau 4,40 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Masalah pengangguran perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Jumlah pengangguran yang besar akan

menimbulkan hal yang tidak baik untuk pembangunan, karena angka pengangguran yang tinggi akan berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pula. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, antara lain ditandai oleh jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar, pendapatan relatif rendah dan kurang merata.

Tabel. 7.3.1

Persentase Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2012 – 2014 (%)

Kegiatan	2012			2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Angkatan Kerja</u>	81,22	48,58	64,47	79,19	47,51	62,94	80,25	50,65	65,19
Bekerja	76,35	45,00	60,27	73,70	44,14	58,54	75,29	47,10	60,95
Pengangguran	4,87	3,58	4,21	5,48	3,37	4,40	4,96	3,55	4,24
<u>Bukan Angkatan Kerja</u>	18,78	51,42	35,53	20,81	52,49	37,06	19,75	49,35	34,81
Sekolah	10,50	10,98	10,75	9,17	11,04	10,13	11,54	13,20	12,38
Mengurus RT	0,89	35,14	18,46	1,89	35,94	19,36	1,60	32,44	17,29
Lainnya	7,39	5,30	6,31	9,75	5,51	7,58	6,62	3,71	5,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Kondisi yang berbeda dengan kelompok angkatan kerja terjadi pada penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, yaitu pada tahun 2014 memiliki jumlah lebih sedikit dibanding tahun 2013, namun secara

persentase juga berkurang. Pada tahun 2013 penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah 1.245,23 ribu orang atau sebesar 34,81 persen.

Tabel 7.3.2
Penduduk Sumatera Barat yang Berumur 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Tahun 2012– 2014 (000 orang)

Kegiatan	2012			2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Angkatan Kerja</u>	1 137,16	842,66	2 179,82	1 321,35	835,03	2 156,38	1 410,08	921,91	2 331,99
Bekerja	1 257,02	780,62	2 037,64	1 229,85	775,77	2 005,62	1 322,97	857,36	2 180,34
Pengangguran	80,14	62,04	142,18	91,50	59,26	150,76	87,11	64,55	151,66
<u>Bukan Angkatan Kerja</u>	309,19	891,88	1 201,07	347,34	922,47	1 269,81	347,00	898,22	1 245,23
Sekolah	172,91	190,48	363,39	153,05	193,95	347,00	202,71	240,30	443,01
Mengurus RT	14,68	609,53	624,21	31,59	631,67	663,26	28,03	590,39	618,43
Lainnya	121,60	91,87	213,47	162,70	96,85	259,55	116,26	67,53	183,79
Jumlah	1 646,35	1 734,54	3 380,89	1 668,69	1 757,49	3 426,18	1 757,08	1 820,14	3 577,22

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada kelompok bukan angkatan kerja penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Pada tahun 2014 terdapat 898,22 ribu penduduk perempuan yang termasuk pada kelompok bukan angkatan kerja. Sebagian besar kegiatan penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja ini adalah mengurus rumahtangga yang mencapai jumlah 590,39 ribu orang. Sementara itu penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bersekolah adalah sebanyak 240,30 ribu orang dan kegiatan lainnya sebanyak 67,53 ribu orang. Sedangkan penduduk laki-laki yang termasuk bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 347,00 ribu orang, dengan rincian kegiatan 202,71 ribu orang sekolah, 28,03 ribu orang mengurus rumahtangga dan 116,26 ribu orang melakukan kegiatan lainnya.

7.4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

Hasil Sakernas tahun 2014 mencatat bahwa penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas di Sumatera Barat berjumlah 2.683.851 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada

tahun 2013 penduduk bekerja sudah berjumlah sebanyak 2.683.851 orang.

Sektor Pertanian masih merupakan sektor utama bagi penduduk Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Walaupun saat ini peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat makin berkurang, sektor ini masih merupakan yang dominan dalam menyerap tenaga kerja. Sedangkan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik, gas, dan air minum.

Pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian mengalami peningkatan namun secara persentase mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2014 terdapat 818.714 orang (30,51 persen) yang bekerja di sektor pertanian, dan sementara itu pada tahun 2013 terdapat 788.940 ribu orang (39,34 persen) di sektor pertanian.

Tabel 7.4.1
Penduduk Bekerja Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha Utama
di Sumatera Barat Tahun 2013 dan 2014

Lapangan Usaha	2013		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	788 940	39,34	818 714	30,51
2. Pertambangan dan Penggalian	35 030	1,75	40 899	1,52
3. Industri Pengolahan	129 539	6,46	149 483	5,57
4. Listrik, Gas dan Air Minum	4 801	0,24	6 530	0,24
5. Bangunan	98 396	4,91	115 213	4,29
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	461 023	22,99	487 056	18,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi	96 958	4,83	96 540	3,60
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	42 492	2,12	46 915	1,75
9. Jasa Kemasyarakatan	348 446	17,37	418 986	15,61
Jumlah	2 005 625	100,00	2 683 851	100,00

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Selain Sektor Pertanian, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa Kemasyarakatan. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2014 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 487.056 orang (18,15 persen). Tenaga kerja pada sektor tersebut lebih banyak dibanding tahun 2013 yang berjumlah 461.023 orang (22,99 persen). Sementara itu pada tahun 2014 sektor jasa kemasyarakatan

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 418.986 orang (15,61 persen), sedangkan pada tahun 2013 tercatat sebesar 348.446 orang (17,37 persen). Sedangkan sektor industri pengolahan yang diharapkan sebagai sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja yang banyak ternyata sampai saat ini masih belum mampu menyerap tenaga kerja di Sumatera Barat. Pada tahun 2014 menyerap 149.483 orang yang bekerja di sektor industri pengolahan atau hanya 5,57

persen dari total tenaga kerja. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tahun 2013 yang justru lebih sedikit dalam menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 129.539 orang atau 6,49 persen dari penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas.

7.5. Kesejahteraan Masyarakat

7.5.1. Pola Konsumsi Masyarakat

Salah satu ukuran untuk menentukan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari pola konsumsi masyarakatnya. Pola konsumsi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui apabila pengeluaran untuk kebutuhan non makanan makin besar daripada pengeluaran untuk kebutuhan makanan.

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat sampai saat ini menunjukkan

bahwa pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibanding non makanan. Pada tahun 2014 pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat mencapai angka 800.516 rupiah. Sementara itu pada tahun 2013 pengeluaran rata-rata per kapita sedikit lebih rendah yaitu sebesar 768.446 rupiah.

Berdasarkan jenisnya, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Sumatera Barat tahun 2014 terdiri dari 455.098 rupiah merupakan pengeluaran untuk makanan dan 345.418 rupiah adalah pengeluaran untuk non makanan. Sedangkan di tahun 2013 pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan adalah sebesar 434.292 rupiah dan non makanan sebesar 334.154 rupiah.

Tabel 7.5.1
Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Sumatera Barat,
Tahun 2013 dan 2014

Jenis Pengeluaran	2013		2014	
	Nilai (rp)	%	Nilai (rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	434 292	56,52	455 098	56,85
Non Makanan	334 154	43,48	345 418	43,15
Jumlah Pengeluaran	768 446	100,00	800 516	100,00

Sumber : Susenas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Walaupun terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Sumatera Barat, namun perbandingan persentase antara pengeluaran untuk makanan dan non makanan pada tahun 2013 dan 2014 hampir sama. Di tahun 2014 pengeluaran per kapita untuk makanan adalah sebesar 56,85 persen dan non makanan sebesar 43,48 persen. Pada tahun 2013 pengeluaran untuk makanan sebanyak 56,52 persen sedangkan non makanan adalah 43,48 persen.

7.5.2. Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan

7.5.2.1 Pemerataan Pendapatan

Peningkatan pendapatan penduduk di suatu wilayah belum dapat dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat jika peningkatan pendapatan itu belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Di samping peningkatan pendapatan masih diperlukan pemerataan pembagian pendapatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan tersebut dapat digunakan dua cara, yaitu

dengan kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini (Gini Rasio).

Menurut kriteria Bank Dunia, penduduk dibagi atas tiga golongan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Sementara itu, untuk mengukur ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Jika kelompok ini menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dianggap tinggi. Namun, sebaliknya jika kelompok ini menerima antara 12 sampai dengan 17 persen dari seluruh pendapatan, maka tingkat ketimpangannya dianggap sedang.

Sementara itu jika kelompok ini menerima lebih dari 17 persen maka ketimpangan dianggap rendah.

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk suatu wilayah. Jika indeks Gini menunjukkan angka kurang dari 0,30 maka pendapatan penduduk dikatakan cukup merata (ketimpangan rendah). Bila bernilai 0,30 sampai 0,50 berarti memiliki ketimpangan sedang, dan bila lebih dari 0,50 berarti memiliki ketimpangan tinggi.

Tabel 7.5.2.1
Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2009-2014

Tahun	Distribusi Pengeluaran			Gini Rasio
	40 % rendah	40 % sedang	20 % tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	23,26	39,38	37,36	0,30
2010	20,55	39,24	40,22	0,33
2011	26,15	40,08	33,77	0,33
2012	24,91	40,15	34,95	0,35
2013	25,07	37,65	37,28	0,34
2014	21,31	37,23	41,46	0,32

Sumber : Susenas, BPS Provinsi Sumatera Barat

Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia menggunakan data pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan data pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan. Dari Tabel 7.5.2.1.1 diketahui bahwa persentase pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap seluruh pengeluaran penduduk dari tahun 2009 sampai tahun 2014 berada diatas 17 persen. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat termasuk pada kriteria rendah.

Walaupun ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat masih termasuk kriteria rendah dengan angka yang berfluktuasi, namun sampai dengan tahun 2010 terdapat kecenderungan bahwa kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah makin memperoleh distribusi pendapatan yang makin mengecil, karena pada tahun 2010 hanya memperoleh bagian 20,55 persen, padahal pada tahun sebelumnya telah

mencapai 23,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 kelompok 40 persen terendah mendapat distribusi pendapatan yang makin besar, yaitu 26,15 persen, dan pada tahun 2012 kembali berkurang menjadi 24,91 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 25,07. Pada tahun 2014 penduduk yang termasuk 40 persen terendah pendapatannya mendapat distribusi pendapatan yang semakin mengecil yaitu sebesar 21,31 persen.

Keadaan yang hampir sama juga ditemukan pada kelompok 40 persen yang mempunyai pendapatan sedang dan 20 persen berpendapatan tinggi yang cenderung berfluktuasi. Walaupun berfluktuasi, tapi terdapat kecenderungan sampai dengan tahun 2012 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen sedang makin lama makin meningkat sedangkan pada kelompok 20 persen tinggi semakin berkurang. Pada tahun 2013 distribusi pengeluaran pada kedua kelompok ini hampir sama, namun pada tahun 2014 distribusi pendapatan pada kelompok 40 persen sedang lebih kecil dibanding dengan kelompok 20

persen tinggi, yaitu masing-masingnya sebesar 37,23 dan 41,46.

Berdasarkan pada indeks gini rasio selama tahun 2009-2014 ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat masih termasuk pada kriteria sedang. Walaupun masuk kriteria sedang, indeks gini rasio menunjukkan kecenderungan untuk mengalami peningkatan. Peningkatan itu menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk makin lama bertambah lebar. Pada tahun 2009 tercatat indeks gini rasio sebesar 0,30, selanjutnya pada tahun 2010 dan 2011 indeks gini mencapai angka 0,33. Pada tahun 2012 indeks gini rasio mencapai angka tertinggi yakni sebesar 0,35 dan sedikit menurun di tahun 2013 menjadi 0,34. Penurunan terus berlanjut di tahun 2014 dan mencapai angka 0,32. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya kewaspadaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar jangan kesenjangan pendapatan ini makin bertambah lebar karena kesenjangan tersebut akan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan bisa meningkatkan angka kriminalitas.

7.5.2.2. Penduduk Miskin

1) Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomis. Ukuran yang dipakai adalah dengan metode *Head Count Index*, yang merupakan kemiskinan absolut.

Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut *garis kemiskinan*. Garis kemiskinan ini merupakan nilai dari kebutuhan karena (dua) komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

2) Garis Kemiskinan

Standar kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah berbeda-beda. Standar kemiskinan antara daerah perkotaan dengan perdesaan juga berbeda. Perbedaan

standar kemiskinan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain perbedaan tingkat pendapatan, pola konsumsi maupun ketersediaan barang dan jasa. Tinggi rendahnya pendapatan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, sedangkan pola konsumsi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya ketersediaan barang dan jasa. Karena perbedaan-perbedaan itulah maka garis kemiskinan juga dibedakan antara garis kemiskinan perkotaan dan garis kemiskinan perdesaan.

Garis kemiskinan yang merupakan pembatas antara penduduk miskin dan yang tidak miskin di Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat garis kemiskinan sebesar 336.606 rupiah, dan pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2014 mencapai angka 365.827 rupiah.

Tabel 7.5.2.2

Perkembangan Garis Kemiskinan Sumatera Barat, 2010 – 2014
(rupiah/kapita/bulan)

Daerah	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Perkotaan (K)	262 173	308 068	321 128	360 768	390 862
Pedesaan (D)	214 458	255 719	273 655	321 252	349 824
Perkotaan+Pedesaan (K + D)	230 823	276 000	292 052	336 606	365 827

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Bila dilihat berdasarkan wilayah, ternyata daerah perkotaan memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan di perkotaan adalah sebesar 390.862 rupiah/kapita/bulan, sedangkan di pedesaan sebesar 349.824 rupiah/kapita/bulan. Perkembangan garis kemiskinan baik wilayah perkotaan maupun pedesaan menunjukkan pola yang sama dengan garis kemiskinan secara umum, yaitu menunjukkan nilai yang selalu meningkat. Pada tahun 2010 garis kemiskinan perkotaan berada pada angka 262.173 rupiah/kapita/bulan, yang berarti pada tahun 2014 telah

terjadi peningkatan sebesar 49,09 persen, sedangkan di pedesaan pada tahun yang sama garis kemiskinan adalah 214.458 rupiah atau meningkat 63,12 persen di tahun 2014.

3) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Selama periode tahun 2010-2014 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berfluktuasi, namun secara persentase menunjukkan selalu mengalami penurunan. Pada awal periode atau pada tahun 2010 tersebut tercatat penduduk miskin sebesar 430,02 ribu jiwa dan selanjutnya di tahun 2011 makin bertambah sebesar 444,77 ribu orang. Walaupun secara jumlah meningkat, namun penduduk

miskin ini secara persentase dari tahun 2010 ke 2011 mengalami pengurangan. Selanjutnya pada tahun 2012 penduduk miskin makin berkurang, baik dalam jumlah maupun persentase. Pada tahun tersebut terdapat penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 401,52 ribu jiwa dan secara persentase merupakan 8,00 persen dari seluruh penduduk Sumatera Barat. Di tahun 2013 tercatat penduduk miskin sebesar 384,08 jiwa atau 7,56 persen dari total penduduk dan pada tahun 2014 makin menurun penduduk miskin di Sumatera Barat menjadi 354,74 atau 6,89 persen dari total penduduk.

Secara jumlah ataupun persentase penduduk miskin lebih banyak terdapat di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan. Pada tahun 2014 terdapat 246,21 ribu penduduk miskin di pedesaan,

sedangkan di perkotaan sebanyak 108,53 ribu orang. Penduduk miskin di pedesaan ini mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 258,06 ribu orang. Kondisi yang sama juga ditemui di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin juga berkurang dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 126,02 ribu orang.

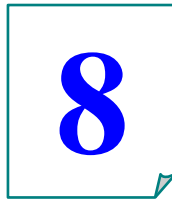
Lebih banyaknya penduduk miskin di pedesaan merupakan fenomena yang wajar terjadi, mengingat penduduk di pedesaan jumlahnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Disamping itu kondisi pedesaan yang cenderung lebih tertinggal dan pola hidup yang lebih sulit dibanding perkotaan menjadikan penduduk miskin lebih banyak di pedesaan dibanding perkotaan.

Tabel 7.5.2.3.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat, 2010-2014

Tahun	Perkotaan (K)		Pedesaan(D)		Perkotaan+Pedesaan	
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	106,18	6,84	323,84	10,88	430,02	9,50
2011	145,99	7,61	298,78	9,85	444,77	8,99
2012	125,39	6,45	276,13	8,99	401,52	8,00
2013	126,02	6,38	258,06	8,30	384,08	7,56
2014	108,53	5,41	246,21	7,84	354,74	6,89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat



PENUTUP

<http://sumberbps.go.id>

Kinerja perekonomian nasional yang makin menurun di tahun 2014 berpengaruh pula pada perekonomian Sumatera Barat. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi nasional umumnya ataupun Sumatera Barat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 5,85 persen. Pertumbuhan Sumatera Barat ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 6,02 persen. Demikian juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional lebih rendah dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,7 persen.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2014 adalah sebesar 133,24 triliun rupiah. Seluruh sektor yang ada mengalami pertumbuhan positif dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat, dengan memberikan andil sebesar 25,04 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor yang berperan sebesar 14,29 persen, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,71 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 10,46 persen dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat.

Sektor pengadaan listrik dan gas walaupun bukan menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB, namun pada tahun 2014 sektor ini ternyata mempunyai laju pertumbuhan paling cepat diantara semua sektor dan mampu tumbuh sebesar 8,68 persen. Sektor yang mempunyai laju pertumbuhan yang hampir sama adalah sektor informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 8,37 persen. Sedangkan yang memiliki laju pertumbuhan paling kecil adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dengan laju sebesar 1,95 persen.

Dilihat dari sisi permintaan keadaannya masih sama dengan tahun lalu, dimana motor penggerak utama perekonomian di tahun 2014 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan memberikan kontribusi

sebesar 54,51 persen pada pembentukan PDRB Sumatera Barat dari sisi penggunaan. Kontributor kedua adalah komponen ekspor dengan andil sebesar 74,82 persen. Namun komponen impor juga tinggi yakni dengan berperan sebesar 73,63 persen.

Sementara itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku Sumatera Barat selama tahun 2014 mengalami kenaikan 12,27 persen dari 28,99 juta rupiah di tahun 2013 menjadi 32,55 juta rupiah di tahun 2014. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan pada PDRB per kapita tersebut.

Pada tahun 2014 inflasi makin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut tercatat inflasi mencapai angka dua digit yaitu sebesar 11,90 persen sedangkan di tahun 2013 inflasi adalah 10,87 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2014 ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2009 dan kedua tertinggi pada periode tahun 2007-2014. Inflasi tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2008 dengan angka inflasi

mencapai 12,68 persen. Inflasi paling rendah pada periode yang sama terjadi pada tahun 2009 dengan inflasi hanya berada pada angka 2,05 persen.

Perkembangan nilai ekspor Sumatera Barat kurang mengembirakan di tahun 2014 karena kinerja ekspor berkurang dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 tercatat ekspor sudah mencapai 2,21 milyar US \$, sedangkan pada tahun 2014 ekspor berkurang menjadi 2,10 milyar US \$.

Komoditi ekspor utama Sumatera Barat sampai dengan keadaan tahun 2014 masih tetap dipegang oleh minyak kelapa sawit dan komoditi ini mampu menyumbang sebesar 1,35 milyar US \$ atau 63,98 persen dari keseluruhan nilai ekspor. Komoditi lainnya yang juga mempunyai andil cukup besar yaitu karet remah yang diekspor senilai 406,65 juta US \$ serta minyak biji kelapa sawit berada di urutan ketiga dengan nilai sebesar 84,31 juta US \$. Sedangkan tiga negara tujuan ekspor utama Sumatera Barat adalah India, Amerika Serikat dan Singapura.

Sementara itu nilai impor Sumatera Barat pada tahun 2014 juga mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2013 impor sudah mencapai nilai 1,04 milyar US, sedangkan di tahun 2014 impor menjadi 1,03 milyar US \$. Pelabuhan Teluk Bayur tercatat sebagai pelabuhan utama sebagai tempat masuknya arus barang-barang ke Sumatera Barat. Pada tahun 2014 senilai 1,03 milyar US \$ atau sekitar 99,99 persen barang-barang diimpor melalui pelabuhan ini. Komoditi dengan nilai tertinggi yang diimpor ke Sumatera Barat adalah golongan barang yang termasuk bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya dengan nilai impor sebesar 920,27 juta US \$ (tahun 2014).

Neraca perdagangan Sumatera Barat selalu mengalami surplus, karena kinerja ekspor lebih besar daripada kinerja impor. Namun di tahun 2009 surplus neraca perdagangan mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu tercatat sebesar 998,01 juta US \$, padahal di tahun 2008 surplus usaha sudah mencapai

1,91 milyar US \$. Selanjutnya di tahun 2010 surplus neraca perdagangan kembali mengalami peningkatan menjadi 1,46 milyar US \$. Peningkatan surplus ini berlanjut terus di tahun 2011 menjadi 1,96 milyar US \$ sedangkan di tahun 2012 surplus perdagangan berkurang menjadi 1,12 milyar US \$. Pada tahun 2013 neraca perdagangan mengalami sedikit peningkatan surplus dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 1,17 milyar US \$. Namun peningkatan ini tidak berlanjut di tahun 2014 dengan neraca perdagangan sebesar 1,07 milyar US \$.

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 lebih tinggi dibanding tahun 2013, pada tahun 2014 tercatat sebesar 3,63 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 3,15 triliun rupiah. Jika dibandingkan antara total penerimaan dengan total pengeluaran, total penerimaan di tahun 2014 lebih tinggi dari pada total pengeluaran. Pada tahun tersebut tercatat realisasi belanja daerah sebesar 3,48 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2013 adalah 3,11 triliun rupiah.

Kota Padang merupakan daerah yang memiliki APBD paling besar. Pada tahun 2014 penerimaan daerah di kota Padang dalam APBD mencapai 1,91 triliun rupiah. Hal ini dimungkinkan karena sebagai ibukota provinsi penerimaan PAD daerah ini paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, yaitu PAD Padang di tahun tersebut mencapai 315,06 milyar rupiah.

Selama tahun 2014 kondisi perbankan masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini direfleksikan oleh meningkatnya kredit dan permodalan bank, meskipun kondisi stabilitas makro ekonomi menghadapi tantangan yang berat akibat dari krisis finansial global. Pada tahun tersebut di provinsi Sumatera Barat masih terdapat 135 bank dengan kantor bank sebanyak 763 buah. Jumlah bank tersebut masih sama banyak dengan keadaan tahun sebelumnya, baik jumlah bank maupun kantor bank.

Penduduk Sumatera Barat sampai saat ini masih selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada awal periode atau pada tahun 2010

jumlah penduduk adalah sebanyak 4.865.331 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen. Di tahun 2014 jumlah penduduk telah mencapai 5.131.882 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,29 persen.

Dilihat menurut jenis kelamin, di Sumatera Barat penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2014 terdapat 2.510.392 laki-laki dan 2.581.490 perempuan. Sedangkan menurut kelompok umur, di Sumatera Barat penduduk usia 15-64 tahun masih merupakan yang terbanyak jumlahnya dibanding kelompok umur lainnya. Di tahun itu terdapat 3.291.564 jiwa penduduk usia 15-64 tahun atau 64,14 persen dari total penduduk.

Tingkat pendidikan di Sumatera Barat masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki ijazah (26,75 persen) dan atau hanya mempunyai ijazah setingkat SD/MI (23,64 persen).

Penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas di tahun 2014

berjumlah 3.557.219 jiwa, yang termasuk angkatan kerja adalah 2.331.993 jiwa namun yang bekerja berjumlah 2.180.336 jiwa. Sampai saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor utama bagi penduduk Sumatera Barat. Pada tahun 2014 sebanyak 30,51 persen penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas berada di sektor pertanian.

Garis kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2014 tercatat sebesar 365.827 rupiah. Garis kemiskinan ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan garis kemiskinan

sebanyak 336.606 rupiah. Sementara itu jumlah penduduk miskin secara persentase makin berkurang, demikian juga dalam jumlah makin berkurang. Pada tahun 2010 penduduk miskin berjumlah 430,02 ribu orang namun di tahun 2011 meningkat menjadi 444,770 ribu orang, sedangkan pada tahun 2012 berkurang menjadi 401,521 ribu orang. Pengurangan penduduk miskin masih berlanjut pada tahun 2013 yaitu pada tahun tersebut terdapat penduduk miskin sebanyak 384,085 ribu jiwa dan di tahun 2014 tercatat sebanyak 354,74 ribu jiwa.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sumbar.bps.go.id>



***Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat***

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25135

Telp. (0751)442158,442159

Website: <http://sumbar.bps.go.id> Email: sumbar@bps.go.id

ISBN : 978-602-1196-54-0



9 786021 196540